

**PENGARUH INTERNAL AUDIT DAN PENERAPAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PADA BADAN LAYANAN UMUM (STUDI PADA UNIVERSITAS
TERBUKA PUSAT DAN UPBJJ (UNIT PEMBELAJARAN JARAK
JAUH)-UNIVERSITAS TERBUKA BOGOR)**



Oleh:

**CITRA INTAN SARI
(200912027)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
JAKARTA
2013**

TANDA PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF

Nama : Citra Intan Sari

NIM : 200912027

Program / Jurusan : Sarjana / Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Layanan Umum (Studi pada Universitas Terbuka pusat dan UPBJJ (Unit Pembelajaran) Jarak Jauh- Universitas Terbuka Bogor)

Tanggal Ujian Komprehensif Skripsi :

Penguji :

Ketua : Drs. Sparta ME.,Ak

Anggota : 1. Gunawan SE.MM

2. Bani Saad SE.,Ak.,Msi

Menyatakan bahwa mahasiswa di atas telah mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS ujian.

Ketua

Drs. Sparta ME.,Ak

Anggota 1

Anggota 2

Gunawan SE.MM

Bani Saad SE.,Ak.,Msi

LAPORAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

I. Pelapor/Penyaji

1. Nama/NIM : Citra Intan Sari
2. Jurusan/Angkatan : Akuntansi

Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Pengendalian Internal dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Layanan Umum (Studi pada BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ (Unit Pembelajaran Jarak Jauh)-Universitas Terbuka Bogor)

II. Penyelenggaraan Seminar

1. Judul proposal penelitian yang diseminarkan :
2. Hari, Tanggal : 20 Mei, 2013
3. Peserta seminar
 - a. Jumlah peserta : 19
 - b. Pemandu : Gunawan, SE.,MM.
 - c. Notulis : Apta Widodo
4. Pengulas (1) : Gunawan, SE.,MM.
Pengulas (2) : Drs. Sparta, ME.Ak.
Pengulas (3) : Bani Saad, SE.,Ak.,Msi.
5. Kesimpulan seminar :
Seminar diawali dengan presentasi dan diakhiri dengan pertanyaan, saran, serta masukan dari pengulas 1, 2, dan 3 yang harus penyaji tambahkan/perbaiki dalam penyusunan skripsi.

Jakarta, 11 Juli 2013

Pemandu,

Gunawan, SE.,MM.

LAPORAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

I. Pelapor/Penyaji

1. Nama/NIM : Rahma Radianti/200912079
2. Jurusan/Angkatan : Akuntansi

II. Penyelenggaraan Seminar

1. Judul proposal penelitian yang diseminarkan :
Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Kualitas Laba Yang Diprosikan Melalui *Earnings Response Coefficient* Pada Perusahaan *Real Estate, Property* dan *Building Construction* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Hari, Tanggal : Jumat, 26 April 2013
3. Peserta seminar
 - a. Jumlah peserta : 8 orang
 - b. Pemandu : Drs. Sparta, ME.Ak.
 - c. Notulis : Carla Laurentia
4. Pengulas (1) : Drs. Sparta, ME.Ak.
Pengulas (2) : Dr. Paulina Harun, SE,M.Si.
Pengulas (3) : Nova Novita, SE.,MS.Ak
5. Kesimpulan seminar :
Seminar diawali dengan presentasi dan diakhiri dengan pertanyaan, saran, serta masukan dari pengulas 1, 2, dan 3 yang harus penyaji tambahkan/perbaiki dalam penyusunan skripsi.

Jakarta, 8 Juli 2013

Pemandu,

Drs. Sparta, ME.Ak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaMu. Terimakasih sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di STIE Indonesia Banking School. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, berbagai pihak baik berupa materiil maupun non- materiil. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, atas semua bentuk kasih sayang. Terimakasih mama yang telah memberikan segalanya, termasuk pengorbanan yang begitu berarti. Terimakasih kepada Alm.papa tercinta yang telah memberikan semangat kepada peneliti sehingga dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk kakak-kakak ku tersayang yaitu, da An, Da dede, da Anton, kak Eca, kak Miranti dan keponakan tercinta yaitu, Athar, Danish dan Aina. Selain itu, terimakasih kepada kepada om Ade yang telah memberikan ku kasih sayang dan segala bentuk dukungan.
2. Bapak Gunawan SE.MM selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, waktu untuk penyusunan skripsi ini serta arahan bagi skripsi ini. Terimakasih pak Gunawan yang rela memberikan waktunya untuk membimbing peneliti, meskipun hampir setiap hari datang meminta bimbingan. Terima kasih pak untuk selalu menerima peneliti dan memberikan semangat serta bimbingan yang luar biasa baik untuk peneliti.
3. Bapak Drs. Sparta ME.,Ak selaku dosen penguji yang juga telah memberikan waktunya selama ini untuk memberikan bimbingan.

4. Bapak Bani Saad SE.,Ak.,Msi selaku dosen penguji yang juga telah memberikan waktunya selama ini untuk memberikan bimbingan.
5. Bapak Taufiq Hidayat SE.,Ak., selaku pembimbing akademik peneliti yang telah membimbing peneliti secara akademik.
6. Ketua STIE Indonesia Banking School Ibu Trinandari Prasetya Nugrahanti, SE. Ak., Msi Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Wakil Ketua II Bapak Taufik Hidayat, SE, Ak., M. Bankfin.
7. Seluruh staf STIE Indonesia Banking School baik bagian akademik, tata usaha, kemahasiswaan, dan staf-staf lain, Pak Arif, Pak Yusuf, Pak Dede, Pak Untung, Mba Ria, Mba Wulan.
8. Teman-teman tersayang dan tercinta Cece, Prima, Tomo, Ica (Emak), Adinda, Waskito, Dahlia, Nyimas, Audrey, Yudha, Dita, Novi, Esa, Isma, Adieb, Apta, Yunica, Lia, Sulistio (opah) . Serta seluruh angkatan 2009 terima kasih atas kebersamaan kalian dari mulai awal semester hingga sekarang, keceriaan dan tawa, semangat dan dukungan dari kalian.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan skripsi ini. Sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Jakarta, Juli 2013

Penulis

(Citra Intan Sari)



ABSTRACT

Some references indicates weaknesses on the corporate governance. This matter somehow has encouraged researcher to work on the study. This research discusses on how internal audit and internal control contributes on actualizing Good Corporate Governance (GCG) at BLU-Universitas Terbuka Pusat and UPBJJ Universitas Terbuka Bogor. The outcomes of these research have shown improvements on Good Corporate Governance (GCG) when the process, internal audit and internal control, are simultaneously combined.

Based on partial test, internal control has significantly contributed on the improvement on actualizing Good Corporate Governance (GCG). In contrary to internal audit, it gives less contribution on the improvement of Good Corporate Governance (GCG) at BLU-Universitas Terbuka Pusat and UPBJJ Universitas Terbuka Bogor.

Keywords : Good Corporate Governance, BLU (Badan Layanan Umum), Internal Audit, Internal Control.



LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Intan Sari

NIM : 200912027

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE Indonesia Banking School.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis, Juli 2013

Citra Intan Sari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRACT	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Peneltian	7
1.5 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II	9
LANDASAN TEORITIS.....	9
2.1 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	9
2.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i>	10
2.1.3 Manfaat dan Tujuan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	11

2.1.4 Unsur-unsur <i>Good Corporate Governance</i>	12
2.1.5 Lingkup <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.6 Tahap-Tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.2 Internal Audit	18
2.2.1 Pengertian <i>Auditing</i>	18
2.2.2 Pengertian Internal Audit	19
2.2.2.1 Perbedaan Antara Auditor Internal dan Eksternal	22
2.2.3 Ruang Lingkup Internal Audit.....	23
2.2.4 Peran dan Tanggung Jawab Internal Audit.....	23
2.2.5 Program Audit Internal.....	25
2.2.6 Internal Audit yang Efektif.....	26
2.3 Pengendalian Internal	27
2.3.1 Konsep Dasar Pengendalian Internal.....	31
2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	33
2.3.3 Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Dalam Pengendalian Internal.....	35
2.3.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	35
2.4 Badan Layanan Umum (BLU)	37
2.4.1 Pengertian, Tujuan, dan Azas BLU	37
2.5 <i>Stewardsip</i> dan <i>Agency Theory</i>	39
2.6 Penelitian Terdahulu.....	42
2.7 Hubungan antara Variabel Independen dan Dependen	46

2.7.1 Internal Audit dan <i>Good Corporate Governance</i>	46
2.7.2 Penerapan Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i>	47
2.7.3 Internal Audit, Penerapan Pengendalian Internal, dan <i>Good Corporate Governance</i>	48
2.8 Rerangka Pemikiran.....	49
2.9 Perumusan Hipotesis	52
BAB III	54
METODE PENELITIAN	54
3.1 Obyek Penelitian.....	54
3.1.1 Responden Penelitian	54
3.1.2 Tempat Penelitian.....	54
3.2 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian	54
3.2.1 Variabel Penelitian.....	54
3.2.2 Variabel Terikat	55
3.2.3 Variabel Bebas.....	55
3.2.4 Operasional Variabel	55
3.3 Metode Pengumpulan Data	62
3.4 Jenis dan Sumber Data	62
3.4.1 Jenis Data.....	62
3.4.2 Sumber Data	63
3.4.3 Populasi Penelitian.....	63
3.5 Model dan Teknik Analisis Data	64
3.5.1 Model Analisis Data	64

3.5.2 Teknik Analisis Data	64
3.5.3 Model Asumsi Klasik Regresi Berganda.....	66
3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik Normalitas.....	65
3.5.3.2 Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas.....	67
3.5.3.3 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas.....	68
3.6 Uji Hipotesis	69
3.6.1 Uji Parsial (Uji t)	68
3.6.2 Uji Simultan (Uji F).....	72
3.6.2.1 Pengujian Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	73
BAB IV	74
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	74
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	74
4.1.2 Gambaran Umum BLU Universitas Terbuka (UT).....	74
4.1.3 Visi dan Misi BLU Universitas Terbuka	75
4.1.4 Maksud dan Tujuan Universitas Terbuka.....	77
4.1.5 Produk dan Jasa	78
4.1.6 Budaya BLU Universitas Terbuka.....	79
4.2 Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Terbuka.....	80
4.2.1 Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Satuan Pengawas Intern Universitas Terbuka (SPI-UT).....	80
4.3 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian	87
4.3.1 Statistik Deskriptif	87

4.3.2	Analisa Hasil Uji Validitas	89
4.3.3	Analisa Hasil Uji Reliabilitas	91
4.3.4	analisa Uji Asumsi klasik	93
4.3.4.1	Analisa Uji Asumsi Klasik Normalitas.....	93
4.3.4.2	Analisa Hasil Uji Multikolinieritas.....	94
4.3.4.3	Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas ...	96
4.3.5	Analisa Regresi Linier Berganda.....	97
4.4	Analisis Uji Hipotesis	99
4.4.1	Pengujian Parsial (Uji t).....	99
4.4.2	Pengujian Simultan (Uji F).....	101
4.4.3	Pengujian Koefisien Determinasi	103
4.5	Analisis Penulis	104
4.5.1	Pengaruh Internal Audit Terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	104
4.5.2	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	111
4.5.3	Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Pengendalian Internal Secara Bersama-sama Terhadap Good Corporate Governance Universitas Terbuka Pusat	

dan Universitas Terbuka UPBJJ-Bogor	114
4.6 Implikasi Manajeria	115
BAB V	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan auditor internal dengan auditor eksternal	22
Tabel 2.2 : Penelitian terdahulu	45
Tabel 3.3 : Bobot alternatif jawaban.....	61
Tabel 4.1 : Statistik Deskriptif.....	88
Tabel 4.2 : <i>Reliability Statistics</i>	91
Tabel 4.3 : <i>Reliability Statistics</i>	91
Tabel 4.4 : <i>Reliability Statistics</i>	92
Tabel 4.5 : Hasil uji reliabilitas penelitian.....	93
Tabel 4.6 : <i>One-sample kolmogrov-smirnov</i>	94
Tabel 4.7: <i>Coefficient correlation</i>	95
Tabel 4.8 : <i>Coefficients</i>	95
Tabel 4.9 : Anova	96
Tabel 4.10 : <i>Coefficients</i>	97
Tabel 4.11 : Koefisiensi model regresi	98
Tabel 4.12 : <i>Coefficients</i>	99
Tabel 4.13 : Anova	102
Tabel 4.14 : <i>Model summary</i>	103
Tabel 4.15 : Anggota SPL.....	105
Tabel 4.16 : Skor rerata indikator variabel internal audit.....	108
Tabel 4.17 : Skor rerata indikator variabel penerapan pengendalian internal	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka pemikiran penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sebagaimana telah diketahui, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69 yaitu instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Pengertian atau definisi BLU menurut pasal 23 UU No.1 tahun 2004, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dengan prinsip efisiensi dan produktivitas yang harus menjadi bagian dari sistem manajemen ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan sistem manajemen di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik agar mampu menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan sesuai

dengan kebutuhan penggunaannya. Dengan menjadi BLU, diharapkan instansi tersebut dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik.

Perubahan status pada sebuah instansi tentunya membawa tantangan baru. Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi *mainstream* adalah konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Hal ini sangat penting untuk bagaimana seharusnya manajemen penyelenggaraan entitas yang baik dan bagaimana seharusnya entitas tersebut menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa, Negara, akuntabilitas public dan sebagainya (Sari dan Raharja, 2012). Dalam penyelenggaraan *Good Corporate Governance (GCG)* mensyaratkan 8 karakteristik dasar, yaitu (1) partisipasi, (2) orientasi pada konsensus, (3) akuntabilitas, (4) transparansi, (5) responsif, (6) efektif dan efisien, (7) ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan (8) penegakan/supremasi hukum. Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu *accountability, transparency, predictability* dan *participation*. Apabila diimplementasikan secara ideal, konsep ini diharapkan dapat memastikan pengurangan tingkat korupsi, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara dari mereka yang paling lemah dalam masyarakat didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)*, entitas memerlukan peran internal audit yang bertugas meneliti mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan. Internal auditor merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan universitas secara efektif dan efisien.

Akuntan memiliki peranan yang paling terpenting dalam peningkatan *Good Corporate Governance*. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah sebagai internal auditor yang memiliki fungsi sebagai *compliance auditor* dan *business consultant* bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (Mahrisa,2008). Internal auditor merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan perusahaan secara efektif dan efisien. Sebelumnya, peran tradisional auditor internal adalah membantu menopang pengendalian internal pada laporan keuangan perusahaan, kini berbagai potensi peluang dan tanggung jawab muncul dalam isu tata kelola yaitu adanya tantangan bagi auditor internal untuk mengeksplorasi berbagai cara agar dapat memberikan *reasonable assurance* bagi para *stakeholders*. Auditor internal menjadi penting dalam isu tata kelola karena menjadi salah satu sumber informasi yang penting bagi komite audit dalam menjalankan tugasnya (Al- Jabali, Abdalmanam, & Ziadat, 2011 dalam Aryanti,2012). Profesi internal auditor mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan keberadaan internal auditor diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya, sehingga mendorong pihak terkait melakukan pengkajian terhadap profesi ini. Profesi internal auditor sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manajemen tertinggi suatu organisasi. Peningkatan pengawasan internal di dalam suatu organisasi tentunya menuntut tersedianya internal audit yang baik, agar terciptanya suatu proses pengawasan internal yang baik pula. Masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan peran internal audit adalah seberapa besar keberadaan internal audit dalam memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan.

Menurut Hiro Tugiman (2006 : 11), “ *Internal auditing* adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan” . Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (1995 : 51), mendefinisikan internal audit adalah sebagai berikut: Internal audit adalah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan.

Selain internal audit, penerapan pengendalian internal dianggap penting dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance*. Dimana menurut Moeller (2009) Pengendalian internal adalah proses yang diimplementasikan oleh manajemen, yang dirancang untuk melakukan penilaian yang cukup bagi :

1. Reabilitas tingkat kepercayaan keuangan dan informasi operasional
2. Kepatuhan terhadap peraturan, rencana prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku
3. Pengamanan asset
4. Efisiensi operasional
5. Pencapaian dari misi yang telah ditetapkan, tujuan, dan program operasi perusahaan
6. Nilai integritas dan etika.

Pada penelitian terdahulu, oleh Sari dan Raharja dengan judul Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia, memiliki tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh peran internal audit terhadap *Good Corporate Governance*.Maka berdasarkan tujuan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran internal audit terhadap mekanisme *Good Corporate*

Governance. Hal ini menunjukkan hipotesis dalam penelitian ini diterima. Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang lainnya yaitu “Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Intern, dan Audit Intern Terhadap GCG”, oleh H.A.Rodi Kartamulja (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan komite audit mempengaruhi pengendalian intern serta peranan komite audit dan pengendalian intern mempengaruhi internal audit secara simultan dan parsial. Selain itu, peranan komite audit, *internal control*, dan internal audit secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi GCG, sedangkan secara parsial hanya internal audit yang mempengaruhi GCG.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia, untuk mendapatkan bukti secara langsung mengenai peran internal audit dan penerapan pengendalian internal didalam sebuah BLU, yaitu Universitas Terbuka.

Universitas Terbuka merupakan salah satu universitas yang memiliki status hukum sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 1984, menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio atau video, computer atau internet, siaran radio dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat). Dalam penyelenggaraan pendidikan, UT bekerja sama dengan semua perguruan tinggi negeri dan sejumlah perguruan tinggi swasta serta instansi yang relevan yang ada di Indonesia.

Uraian latar belakang tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Layanan Umum (Studi pada BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ (Unit Pembelajaran Jarak Jauh)-Universitas Terbuka Bogor)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diangkat dan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh internal audit terhadap *Good Corporate Governance* di BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Bogor ?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance* di BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Bogor ?
3. Apakah terdapat pengaruh internal audit dan penerapan pengendalian internal secara bersama (simultan) terhadap *Good Corporate Governance* di BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Bogor ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Membuktikan apakah peran audit internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Bogor
2. Membuktikan apakah penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Bogor

3. Membuktikan apakah audit internal dan penerapan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap *Good Corporate Governance* BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-UT Bogor

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain:

1. Bagi Penulis

Agar dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang penggunaan konsep *Good Corporate Governance*, khususnya peran internal audit dan penerapan pengendalian internal pada Badan Layanan Umum.

2. Bagi Akademisi Lain

Agar dapat digunakan sebagai referensi untuk pengajaran dan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan aplikasi konsep *Good Corporate Governance*, terutama pada Badan Layanan Umum (BLU).

3. Bagi Badan Layanan Umum (Universitas Terbuka)

Agar dapat digunakan sebagai evaluasi peran internal audit dan penerapan pengendalian internal yang telah ada dalam BLU tersebut. Serta juga dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi BLU guna menerapkan sistem *Good Corporate Governance* yang lebih baik agar operasi BLU menjadi lebih efektif.

1.5 Sistematika Penelitian

Pembahasan penelitian ini dapat dibagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan rumusan masalah sebagai petunjuk untuk mencari jalan terbaik dari permasalahan yang ada.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang di dalamnya membahas mengenai populasi, obyek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, model dan teknis analisis data, uji hipotesis

BAB IV : Hasil dan pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perusahaan yang merupakan obyek penelitian dan pembahasan masalah yang dihadapi oleh perusahaan sebagai dasar untuk menarik simpulan dan memberikan saran yang diperlukan.

BAB V : Simpulan dan saran

Dalam bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran yang berkenaan dengan hasil pembahasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 *Good Corporate Governance (GCG)*

“*Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut” (Pratolo, 2007). James D. Wolfensohn mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan pada perusahaan haruslah dapat dipertanggung jawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (dalam Hery, 2010) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Sehingga fokus dari GCG itu mengarah kepada para pemegang saham utamanya adalah pemegang saham minoritas.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan

nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Dalam Daniri Achmad (2005), secara umum ada lima prinsip dasar GCG yaitu : *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* yang untuk memudahkan dapat kita akronimkan menjadi TARIF. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.3 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Daniri Achmad (2005:16), manfaat GCG terdiri dari saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.

1. Dapat mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber dana yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
2. Meningkatkan nilai perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
3. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat

manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Selain itu, ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* menurut Hery (2010) (dalam Tadikapuri), yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Penerapan GCG pada instansi BLU diharapkan secara umum dapat tercapai secara maksimal.

2.1.4 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2011) (dalam Tadikapuri), unsur-unsur dalam GCG yaitu :

- a. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

1. Pemegang Saham
2. Direksi

3. Dewan Komisaris
4. Manejer
5. Karyawan
6. Sistem remunerasi berdasar kinerja
7. Komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi :

1. Keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*)
 2. Transparansi
 3. Akuntabilitas
 4. Kesetaraan
 5. Aturan dari *code of conduct*.
- b. *Corporate Governance* – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

1. Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
2. Investor
3. Institusi penyedia informasi
4. Akuntan publik
5. Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
6. Pemberi pinjaman
7. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

1. Aturan dari *code of conduct*
2. Kesetaraan

3. Akuntabilitas
4. Jaminan hukum

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*.

2.1.5 Lingkup Good Corporate Governance

OECD (*The Organization for Economic and Development*) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dalam Sutedi (2011) (dalam Tadikapuri), yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu :
 - a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan
 - b. Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham;
 - c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
 - d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh

pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

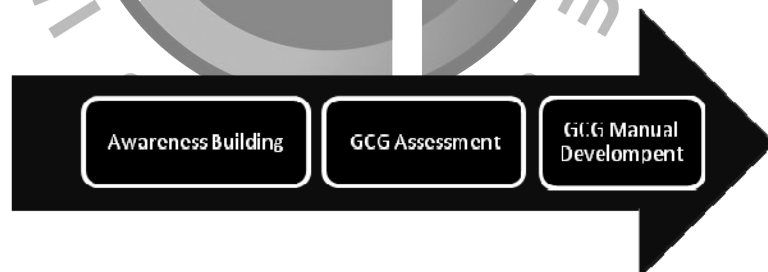
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*). Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*). Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (KAP) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.6 Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

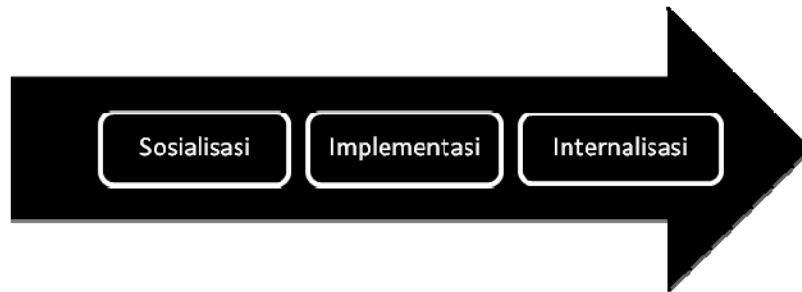
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur dalam perusahaan (Daniri Achmad, 2005:126). Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam penerapan GCG menggunakan pentahapan berikut:

1. Tahap Persiapan



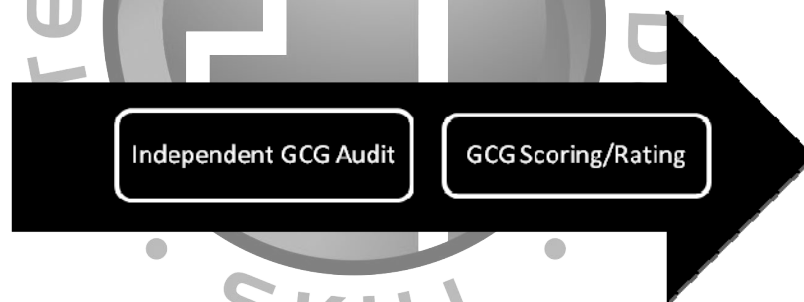
Tahap ini merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

2. Tahap Implementasi



Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai Pedoman Penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan Direktur Utama atau salah satu Direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.

3. Tahap Evaluasi



Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi.

Berbagai penjelasan mengenai *Good Corporate Governance (GCG)* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan umum dari instansi secara efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kepentingan para *stakeholder*. GCG memiliki lima elemen yang dapat menjalankan peran perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kelima elemen tersebut adalah transparansi, kemandirian,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Sejauh ini instansi swasta maupun pemerintah berlomba-lomba untuk menciptakan suasana GCG di dalam instansinya dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik salah satunya.

2.2. Internal Audit

2.2.1 Pengertian *Auditing*

Pengertian *Auditing* yang dikemukakan oleh Arens dan Beasley (2011; 4) adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and valuation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person.”

Artinya yaitu akumulasi dan evaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari para koresponden antara informasi tersebut dengan kriteria yang diberikan. Auditing haruslah dilaksanakan oleh seseorang yang independen dan kompeten.

Auditing memiliki beberapa karakteristik, menurut Arens dan Beasley (2011; 15-17) yaitu :

1. Suatu proses yang sistematis dan terdiri dari serangkaian langkah atau prosedur yang disusun secara terstruktur
2. Membandingkan informasi terukur dari sebuah kesatuan ekonomi tertentu dengan kriteria yang telah ditetapkan
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi secara obyektif bukti-bukti yang diperlukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara informasi yang terukur dengan kriteria yang ditetapkan.
4. Dilakukan oleh orang yang memiliki sikap mental yang independen, pengetahuan yang memadai untuk dapat mengerti tentang kriteria yang

ditetapkan agar ia dapat menarik kesimpulan yang tepat. Seorang auditor juga harus memiliki sikap mental yang bebas.

5. Temuan-temuan selama pemeriksaan dikomunikasikan kepada para pemakai laporan audit untuk menyampaikan tingkat kesesuaian antara apa yang telah diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan. Komunikasi ini biasanya berbentuk laporan audit.

2.2.2 Pengertian Internal audit

Menurut Agoes (2004 : 221) internal audit (pemeriksaan intern) yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan di sini misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain lain, sedangkan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Selain itu definisi internal audit menurut Hiro Tugiman (2001:5), yaitu :

“Internal Auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dijalankan.”

Dan yang terakhir definisi internal audit menurut *The institute of Inteal Auditting Research Foundation* (2007:2), adalah :

“ *Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to*

evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes”.

Pernyataan tersebut akan menjadi sangat penting apabila memfokuskan pada kata-kata kunci internal auditing, yaitu :

- a. Independen, bahwa dalam melakukan audit harus bebas dari pembatasan-pembatasan yang secara signifikan dapat membatasi ruang lingkup dan ketidakefektifan *review* atau laporan hasil temuan dan kesimpulan.
- b. Obyektif, menunjukkan bahwa tidak diperlukan penetapan dalam organisasi, suatu revisi definisi yang mengizinkan jasa internal audit diberikan oleh pihak luar, yang berpengaruh akan pengakuan bahwa kualitas jasa internal audit dapat diperoleh dari luar.
- c. Dengan penekanan bahwa ruang lingkup internal audit meliputi kegiatan memberikan kepastian atau jaminan dan konsultasi, yang merupakan definisi baru sebagai langkah proaktif dan berfokus kepada *customer*, serta memberikan perhatian atas isu utama dalam pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik (*governance*) .
- d. Dengan memikirkan organisasi secara keseluruhan, definisi baru ini sangat memahami bahwa internal audit sebagai arahan yang demikian luas, suatu tanggung jawab yang akan membantu perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan audit intern yang dikemukakan oleh Hartanto (1994 : 294) (dalam Sari dan raharja 2012) adalah sebagai berikut :

1. Meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada pengendalian intern di bidang akuntansi dan operasi cukup dan memenuhi syarat.

2. Menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditentukan betul-betul ditaati.
3. Menilai apakah aktiva perusahaan aman dari kehilangan atau kerusakan dan penyelewengan.
4. Menilai kecermatan data akuntansi dan data lain dalam organisasi perusahaan.
5. Menilai mutu atau pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing manajemen.

Menurut Mulyadi (2002 : 211) (dalam Sari dan Raharja,2012) , fungsi audit internal tertera seperti di bawah ini:

1. Fungsi internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi dari pengendalian intern adalah menilai sejauh mana keefektifan suatu instansi yang berfokus pada bagian uni-unit kecil di dalamnya.
2. Fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dapat diartikan bahwa fungsi audit internal meliputi kegiatan pemeriksaan segala kegiatan dan tahapannya yang tidak terbatas pada bagian keuangan saja. Tidak hanya sampai disitu, audit internal juga mencakup penyelesaian masalah jika terdapat ketidaksesuaian didalamnya, melalui rekomendasi-rekomendasi yang membangun.

Ruang lingkup dari pekerjaan internal audit oleh SPI yang terdapat di dalam Standar Profesi Akuntan Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 20) yaitu “fungsi audit intern melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan

governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. Sehingga maksud dari pengertian ini adalah pihak SPI membantu instansi dalam hal identifikasi risiko yang dimiliki instansi, kemudian memfokuskan diri pada risiko tersebut agar dapat meningkatkan pengelolaan risiko tersebut dan melakukan pengendalian internal.

2.2.2.1 Perbedaan antara Auditor Internal dan Eksternal

Auditor eksternal tidak terlalu memperhatikan kecurangan atau pemborosan yang tidak memiliki dampak yang signifikan, atau tidak material terhadap laporan keuangan. Adapun auditor internal sangat memperhatikan pemborosan dan kecurangan, dari manapun sumbernya dan sekecil apapun jumlahnya, (Widyahatma Gede, 2009). Dengan hal tersebut terlihat suatu perbedaan mendasar antara audit eksternal dan audit internal, yaitu audit eksternal memiliki fokus yang sempit, sementara audit internal memiliki ruang lingkup yang komprehensif (Sawyers 2006 ; 9).

Perbedaan utama antara auditor internal dan eksternal akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Perbedaan Auditor Internal dengan Auditor Eksternal

No	Auditor Internal	Auditor Eksternal
1	Merupakan karyawan perusahaan, atau bias saja merupakan entitas independen	Merupakan orang yang independen diluar perusahaan.
2	Melayani kebutuhan organisasi, meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan	Melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan
3	Fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi	Fokus pada ketetapan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan
4	Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah	Sekali-sekali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila

		kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material.
5	Independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua tingkatan manajemen	Independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun secara mental
6	Menelaah aktivitas secara terus-menerus	Menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik, biasanya sekali setahun.

Sumber : Sawyers (2006)

2.2.3. Ruang Lingkup Internal Audit

Menurut Lawrence B. Sawyer (2006:10), ruang lingkup internal audit yaitu untuk menentukan :

1. Apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang biasa diterima telah diikuti
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

2.2.4 Peran dan Tanggung Jawab Internal Audit

Section 404 dari *The Sarbanes-Oxley Act* meminta *annual assessment* dari *internal control* untuk meyakinkan laporan keuangan dibuat secara akurat. Audit internal memenuhi kebutuhan ini dengan mengevaluasi ketepatan dan keefektifan *control* organisasi. Mereka memeriksa keandalan dan integritas dari informasi keuangan,

efektivitas dan efisiensi operasi, dan bagaimana organisasi melindungi asset yang dimiliki serta kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kontrak. Menurut *One Hundred Second Congress of the United States of America* (2002), undang-undang Sarbanes-Oxley pasal 404 terdiri atas 2 sub pasal utama:

Bagian 404 (a) : SEC untuk mengeluarkan aturan-aturan untuk melaporkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan tahunan.

Bagian 404 (b) : Laporan yang akan diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh PCAOB

Jika dilihat dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan pengendalian intern merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan juga mendukung manajemen dan pelaksanaannya, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan semestinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut *Institute of Internal Auditor* (IIA), peran auditor internal secara jelas diantaranya :

1. Menilai dan menganalisis risiko serta menindak lanjuti sistem pengendalian perusahaan atau organisasi
2. Menguji, mengecek, dan memverifikasi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem.
3. Jaminan yang diberikan oleh auditor internal untuk masing-masing Dewan Direksi, Komite Audit, dan senior manajemen pada risiko yang di hadapi oleh perusahaan dan tingkat pengendalian serta pernyataan kekuatan dan efektivitas kinerja pengawasan perusahaan.

4. Menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan operasi, kebijakan, dan prosedur saat peluang yang tepat tersedia untuk meningkatkan kinerja pengawasan perusahaan.
5. Menyediakan jasa nasihat terkait aspek operasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.

Morariu *et all* (2009) menjelaskan audit internal bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

1. Me-review sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal
2. Mempertimbangkan informasi keuangan dan operasional : metode *review* yang digunakan dengan mengidentifikasi, menghitung, mengklasifikasikan dan melaporkan pemeriksaan spesifik beberapa aspek aktivitas yang dipisahkan termasuk detail verifikasi transaksi, *account balances* dan prosedur yang digunakan untuk mengatur hal tersebut.
3. Me-review ekonomis, keefektifan, dan efisiensi dari sistem setiap aktivitas dan kategori operasi
4. Me-review kesesuaian dengan hukum yang berlaku dan peraturan yang dikeluarkan pimpinan perusahaan.
5. Investigasi spesial dalam tujuan tertentu misalnya kecurigaan adanya penipuan dan hal lain tentang *losses prevention*.

2.2.5 Program Audit Internal

Hiro Tugiman (1995 : 45-70) membagi program audit internal menjadi empat, antara lain :

1. Perencanaan pemeriksaan (*Planning the audit*)

Pemeriksa internal (internal auditor) haruslah merencanakan setiap pemeriksaan.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi (*Examining and evaluation information*)

Pemeriksaan internal haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan (*Communicating result*)

Pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (*Following up*)

Pemeriksa internal harus terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan cepat.

2.2.6 Internal Audit yang Efektif

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha suatu perusahaan, adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat diperlukan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki departemen internal audit yang efektif dalam membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian, dan saran mengenai kegiatan yang diperiksanya Sawyers (2006:52).

1. Departemen internal audit harus mempunyai kedudukan independen dalam organisasi perusahaan, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang diperiksanya.
2. Departemen internal audit harus mempunyai uraian tugas tertulis yang jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Departemen internal audit harus pula memiliki internal audit manual yang berguna untuk
 - a. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
 - b. Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan *performance*

- c. Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen internal audit telah sesuai dengan *requirement* kepala audit internal
3. Departemen internal audit harus memiliki dukungan yang kuat dari *top management*. Dukungan yang kuat dari *top management* tersebut dapat berupa :
 - a. Penempatan departemen internal audit dalam posisi yang independen
 - b. Penempatan staf audit dengan gaji yang *rationable*
 - c. Penyediaan waktu yang cukup dari *top management* untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh departemen internal audit dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan.
4. Departemen internal audit harus memiliki sumber daya yang profesional, berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
5. Departemen internal audit harus bersifat kooperatif dengan akuntan publik
6. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai departemen internal audit
7. Pemberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
8. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian-pemberian dari luar.
9. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal

2.3 Pengendalian Internal

Urgensi penerapan sistem *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan sangat bergantung pada kontribusi sistem tersebut terhadap kesejahteraan perusahaan. Prinsip *Good Corporate Governance* secara mendasar mengatur mengenai *stakeholders*

yang memiliki keinginan relevan dalam bisnis perusahaan yang dikelola dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang baik dan manajemen risiko (Elliot, letza, McGuinness, & Smallman, 2000) dalam *Revise Turnbull Guidance* (2005) disebutkan pentingnya penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko dalam sebuah perusahaan, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian internal berkontribusi dalam menjaga investasi pemegang saham dan asset perusahaan
2. Pengendalian internal memfalisitasi operasi bisnis yang efektif dan efisien, serta membantu untuk memastikan realibitasi pelaporan internal dan eksternal serta membantu dalam pemenuhan terhadap hukum dan regulasi
3. Pengendalian financial yang efektif, termasuk pengaturan pencatatan akuntansi, merupakan elemen yang penting dalam pengendalian internal
4. Tujuan perusahaan, organisasi internalnya dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi secara terus menerus berubah, sehingga risiko perusahaan pun berubah yang selanjutnya

Pada 1992, setelah melalui berbagai macam penyesuaian, konsep akhir COSO pengendalian internal diterbitkan. *Comitte of Sponsoring Organization* (COSO) didirikan akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970an. Kerangka pegendalian internal COSO telah menjadi kerangka pengendalian internal di seluruh dunia untuk membangun dan menilai pengendalian internal. Terdapat dua jenis kerangka COSO, yaitu kerangka COSO Pengendalian internal dan *COSO Enterprise Risk Management* (ERM). Tujuan dari kerangka COSO adalah :

1. Untuk meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dengan cara menitikberatkan fokus pada manajemen perusahaan, standar etika dan pengendalian internal
2. Untuk menyatukan berbagai interpretasi dan konsep pengendalian internal.

Sedangkan tujuan penerapan *Turmbull Guidance* adalah untuk menghubungkan antara risiko dan pengendalian internal dengan tujuan bisnis perusahaan.

Terdapat berbagai definisi pengendalian internal. Definisi pengendalian internal menurut Robert Moeller (2009) adalah sebagai berikut :

Pengendalian internal adalah proses, yang diimplementasikan oleh manajemen, yang dirancang untuk melakukan penilaian yang cukup bagi :

1. Reabilitas tingkat kepercayaan keuangan dan informasi operasional
2. Kepatuhan terhadap peraturan, rencana prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku
3. Pengamanan asset
4. Efisiensi operasional
5. Pencapaian dari misi yang telah ditetapkan, tujuan, dan program operasi perusahaan.
6. Nilai integritas dan etika

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa pengendalian internal tidak hanya meliputi permasalahan akuntansi dan keuangan, namun mencakup semua proses yang terjadi di perusahaan. Sebuah perusahaan atau proses dalam perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik apabila :

1. Mencapai misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan berdasarkan etika berlaku
2. Menghasilkan data yang akurat dan *reliable*

3. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
4. Menggunakan sumber daya secara ekonomis dan efisien
5. Menyediakan sistem pengamanan asset yang cukup.

Terdapat 5 komponen pengendalian internal, dijabarkan sebagai berikut (Moeller : 2009)

1. *Control environment* (Lingkungan Pengendalian)

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen *internal control* dan menyediakan disiplin dan struktur. Management senior wajib mendisain pengaruh yang positif atas kesadaran pengawasan dari para karyawan perusahaan.

2. *Risk assessment* (Penilaian Risiko)

Perusahaan harus peduli dan sepatutnya untuk menghadapi resiko yang ada. Perlu dibuat tujuan yang terintegrasi melalui semua nilai rantai aktivitas (*chain activities*) yang ada, sehingga perusahaan beroperasi dengan baik. Setelah tujuan ditetapkan, perusahaan selanjutnya harus mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan menganalisis serta mengembangkan cara-cara untuk mengelolanya.

3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi untuk mengatasi risiko dilakukan. Kegiatan pengendalian ada di semua tingkatan perusahaan dan kemungkinan dapat saling tumpang tindih. Kerangka COSO pengendalian internal mengidentifikasi aktivitas-aktivitas pengendalian internal yang efektif berdasarkan tipe prosesnya.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi yang cukup, yang didukung oleh system teknologi informasi harus dikomunikasikan dari atas ke bawah perusahaan dalam kurun waktu tertentu melalui prosedur yang efektif, baik komunikasi eksternal dan internal perusahaan, maupun komunikasi informal dan formal perusahaan.

5. Pemantauan

Sebuah proses pemantauan harus merupakan sebuah proses yang menilai efektivitas dalam menentukan komponen pengendalian internal dan untuk mengambil langkah koreksi ketika dibutuhkan. Sebuah perusahaan harus menentukan berbagai macam aktivitas pemantauan untuk mengukur efektivitas dari pengendalian internalnya.

Semua anggota perusahaan bertanggung jawab terhadap pengendalian internal sesuai porsi tanggung jawabnya masing-masing agar proses operasi perusahaan berjalan secara efektif. Kerangka COSO pengendalian internal mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut :

Pengendalian internal adalah sebuah proses, yang dipengaruhi oleh direksi (*board of directors*) dari perusahaan, manajemen, dan personel perusahaan lainnya, yang dirancang untuk menyediakan penilaian yang berdasarkan pencapaian dari tujuan perusahaan yang mencakup kategori sebagai berikut :

1. Efektivitas dan efisiensi dari operasi
2. Realibilitas dan laporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.3.1 Konsep Dasar Pengendalian Internal

Berdasarkan pengertian pengendalian internal yang telah dikemukakan, terdapat beberapa konsep yang mendasari pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2002:180) konsep dasar tersebut adalah :

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengertian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat persuasive dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari instruktur entitas
2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak
3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak
4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

Konsep pengendalian internal tersebut bermanfaat sebagai acuan bagi manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal dalam bank. Manajemen bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal bias mempersiapkan sebaik mungkin mulai dari proses, personil, tujuan, serta apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pengendalian internal.

2.3.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Dalam bukunya, Arens (2011) menyatakan bahwa manajemen biasanya memiliki tiga tujuan yang luas dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, antara lain :

1. Keandalan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab menyiapkan laporan untuk investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab legal dan profesional untuk memastikan bahwa informasi disajikan dengan mengikuti persyaratan pelaporan yang berlaku umum
2. Efisiensi dan efektivitas operasi. Control di dalam perusahaan mendorong penggunaan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tujuan penting dari pengendalian internal adalah keakuratan informasi keuangan dan non keuangan tentang operasi perusahaan untuk pembuatan keputusan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Organisasi publik, non publik, dan non profit wajib untuk mengikuti berbagai aturan hukum. Beberapa berhubungan tidak langsung dengan akuntansi, seperti perlindungan lingkungan dan hak hukum sipil yang berkaitan dengan akuntansi seperti peraturan pendapatan pajak dan kecurangan.

Selain itu, pengendalian internal yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan. Tujuan dari pengendalian intern (Zaki, 1999) yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.
3. Memajukan efisiensi operasi perusahaan.
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih
5. dahulu untuk dipatuhi.

Hall (2001) menyebutkan tujuan utama dari pengendalian internal adalah :

1. Untuk menjaga aktiva perusahaan
2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi
3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan
4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Boynton dkk (2003) mengungkapkan pentingnya pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan mengendalikan operasi secara efektif
2. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
3. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian intern klien.

Tujuan pengendalian intern sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2002), tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:

1. Keandalan informasi keuangan,
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektifitas dan efisiensi operasi

2.3.3 Tanggung Jawab Manajemen dan Auditor Dalam Pengendalian Internal

Tanggung jawab terhadap pengendalian internal berbeda bagi manajemen dan auditor, berikut adalah perbedaan tanggung jawab bagi keduanya :

1. Tanggung jawab manajemen untuk menegakkan pengendalian internal

Manajemen , bukan auditor, yang harus menegakkan dan memelihara pengendalian internal entitasnya. Konsep ini konsisten dengan ketentuan bahwa manajemen, bukan auditor, yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PABU. Dua konsep penting yang mendasari manajemen dalam merancang dan menerapkan pengendalian internal adalah :

- a. Keyakinan yang memadai.
- b. Keterbatasan bawaan.

2. Tanggung jawab auditor memahami pengendalian internal

Seperti dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan kedua standar audit yang berlaku umum bahwa, “auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai mengenai pengendalian entitas dan lingkungannya, **termasuk pengendalian internalnya**, untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan dan untuk merancang sifat, waktu dan keluasan prosedur audit lanjutan. Auditor pada umumnya sangat menekankan pada :

- a. Pengendalian terhadap keandalan laporan keuangan.
- b. Pengendalian terhadap kelompok-kelompok transaksi.

2.3.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2011 disebutkan bahwa : pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Maksud dan tujuan pemerintah menetapkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bahan pendukung laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah. Suatu SPIP dikatakan

baik apabila memenuhi lima unsur Sistem Pengendalian Intern (Sudjono dan Hoesada, 2009) yaitu meliputi:

1. Lingkungan pengendalian dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
2. Penilaian risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
3. Kegiatan pengendalian untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5. Pemantauan pengendalian intern atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

2.4 Badan Layanan Umum

2.4.1 Pengertian, Tujuan, dan Azas BLU

Pengertian atau definisi BLU diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dan Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat”.

Sedangkan asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu :

1. Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dan instansi induknya
2. Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk
3. BLU tidak mencari laba
4. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah
5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Dari uraian definisi, tujuan dan asas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu :

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dan kekayaan negara
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat
3. Tidak bertujuan untuk mencari laba

4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil
8. BLU bukan subyek pajak.

2.5 Stewardship dan Agency Theory

Menurut Daniri Achmad (2005), dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun pemegang saham pada khususnya.

Sementara itu *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai '*agents*' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Hal penting dalam Teori Agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori Agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan. Sedangkan dalam teori *stewardship*, manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi

dibanding mementingkan tujuannya sendiri. Dari riset empiris terdapat usaha untuk mensahkan salah satu teori. Teori Agensi atau Teori Stewardship sebagai yang terbaik dalam organisasi perusahaan. Hasil studi ini adalah campuran dari keduanya, dibutuhkan keduanya untuk menjelaskan manajemen. Sebagai contoh, beberapa riset menemukan bahwa dengan teori agensi, kepemimpinan yang independen mempunyai kinerja perusahaan yang tinggi. Sedangkan temuan para riset lain dalam teori stewardship juga menemukan kinerja perusahaan yang tinggi. Berdasarkan riset ini tidak dapat diketahui perbedaan kinerja dari kedua teori tersebut. Bukti empiris adalah penggunaan keduanya dengan tanggapan positif pada dimensi perintah lainnya. Gabungan ini akan mendorong pendukung teori agensi dan teori *stewardship* untuk menyamakan perbedaan keduanya (Eko Raharjo).

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Teori keagenan merupakan teori utama (*grand theory*) atas pemanfaatan jasa Satuan Pengawas Internal oleh instansi. Dalam kaitannya dengan peran audit eksternal dan penerapan pengendalian internal teori keagenan yang dikembangkan oleh Jansen dan Meckling (1976) ini menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*shareholders*) dan konflik tersebut menjadi pemicu perhatian manajemen (Wayan, 2010 dalam Sari dan Raharja). Dalam kaitannya dengan SPI, teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen

dengan para *stakeholder*, membuat pentingnya Satuan Pengawas Internal di kalangan instansi BLU. Kecenderungan dari pihak manajemen BLU yang menginginkan keuntungan pribadi, akan membuat dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu diperlukan peran dari Satuan Pengawas Internal yang mana kepala dari SPI ini kedudukannya langsung ada di bawah kepala instansi BLU dengan tujuan ketika hendak mengambil tindakan dapat maksimal tanpa adanya kecanggungan.

Manajemen instansi merupakan pegawai yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola segala aset negara. Oleh karena itu BLU merupakan instansi milik pemerintah, BLU mendapatkan bantuan dana pengelolaan dari pemerintah melalui APBN maupun APBD dengan tujuan peningkatan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, manajemen dari BLU merupakan salah satu agen dari pemerintah yang dipercaya untuk mengelola aset dan keuangan negara, agar tercipta suatu tujuan dari BLU tersebut secara efektif dan efisien. Ketika pihak manajemen mampu menempatkan diri sebagai agen yang baik, maka sudah tentu *Good Corporate Governance* dapat tercapai.

Agency theory mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada (Wolfenshon, 1999 dalam Sari dan Raharja). Dapat diperjelas bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan, pihak manajemen dalam hal ini manajemen BLU kurang dipercaya oleh *stakeholder* karena benturan kepentingannya seperti yang telah dijelaskan di atas. Manajemen cenderung memperlihatkan kondisi yang baik di dalam instansi BLU-nya, untuk pencapaian kepentingan pribadi. “Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai

peraturan dan ketentuan yang berlaku” (Wolfenshon, 1999).Teori ini tidak hanya menguatkan pelaksanaan GCG tetapi juga mempertegas lagi bahwa pelaksanaan GCG perlu ditunjang adanya peranan SPI. Sehingga teori ini lebih relevan antara dua variabel yang digunakan di dalam penelitian ini.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini :

1. Penelitian terdahulu mengenai Internal Audit dilakukan oleh Maylia Pramono Sari dan Raharja dengan judul penelitian Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan Good corporate Governance (GCG) pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap Good Corporate Governance (GCG) pada entitas berstatus Badan Layanan Umum (BLU) , jadi dapat dikatakan bahwa peningkatan peran auditor internal akan mempengaruhi tata kelola suatu entitas.
2. Suryo Pratolo (2002) dengan judul Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer pada Organisasi, Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-prinsip GCG dan Kinerja Perusahaan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan antar ketiga variabel. Terdapat pengaruh langsung pengendalian intern terhadap GCG dan terhadap kinerja melalui penerapan GCG. Selain itu, terdapat pengaruh langsung audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi, pengendalian intern, dan penerapan prinsip GCG terhadap kinerja. Faktor pengendalian intern memiliki pengaruh terbesar terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dan kinerja.

3. Davies Marlene (2008) dengan judul “*Effective working relationships between audit committees and internal audit—the cornerst one of corporate governance in local authorities,a Welsh perspective*”. Penelitian ini melihat hubungan kerja antara komite audit dan fungsi audit internal dalam daerah pemerintahan Welsh. Pada penelitian ini ditemukan bahwa hubungankerja antarakomite auditdanaudit internalbergantung kepadakepribadian individu, proses otoritas pemerintahan dan kesediaansemua pihak untuk terlibatdi dalam peran dan tanggung jawab komite audit. Semuanya tercemin dalam pemerintahan yang selalu rentan akan masalah politik yang timbul.
4. Lahu Kurnia (2011) dengan judul “Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Jakarta”. Dengan kesimpulan mendapatkan hasil peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Kimia Farma Tbk. Ini bias dilihat dari pengujian parsial dengan menggunakan uji t diketahui bahwa nilai thitung sebesar 2,591 dengan taraf signifikan sebesar 0,014.
5. H.A.Rodi Kartamulja (2005) dengan judul “Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Intern, dan Audit Intern Terhadap GCG”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan komite audit mempengaruhi pengendalian intern serta peranan komite audit dan pengendalian intern mempengaruhi internal audit secara simultan dan parsial. Selain itu, peranan Komite Audit, internal control, dan internal audit secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi GCG, sedangkan secara parsial hanya internal audit yang mempengaruhi GCG.
6. Cut Imama Muttaqin (2004) dengan judul Pengaruh Faktor-faktor Internal Audit terhadap pelaksanaan GCG. Objek dari penelitian ini adalah faktor-faktor internal

audit seperti independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian internal audit. Ditemukan bahwa secara bersama-sama (simultan) dan secara parsial faktor-faktor internal audit tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan GCG pada BUMN yang berkantor pusat di Jakarta.

7. Efrizal Syofyan (2004) dengan judul Pengaruh Peran Komite Audit, Direksi, dan Internal Audit Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG. Efrizal menemukan bahwa Komite Audit, Direksi, dan Internal Audit secara bersama-sama (simultan) berpengaruh pada tingkat kategori sedang (67,46%) terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip CG. Sedangkan secara parsial, ditemukan bahwa pengaruh Komite Audit adalah sebesar 6,81%, Direksi adalah sebesar 21,72%, dan Internal Audit adalah sebesar (9,55%) terhadap prinsip-prinsip CG. Sedangkan pengaruh Internal Audit terhadap prinsip-prinsip CG melalui peran Komite Audit adalah sebesar 3,25% dan melalui peran Direksi sebesar 6,72%.
8. W. Wenda (2008), dengan judul “Evaluasi Peranan Internal Control Dalam Membantu Auditor Menentukan Sifat, Saat, dan Lingkup Audit atas Prosedur Penggajian Pada PT Lahanwicaksana Prima”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keandalan *internal control* sangat diperlukan dalam perusahaan, untuk mencegah kecurangan dan penyelewengan yang mungkin terjadi. Selain itu *internal control* yang handal juga dapat menetapkan sifat, saat, dan lingkup audit.
9. Amartiwi Windrya (2012), dengan judul “Analisis Peran dan Penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal dan Komite Audit Dalam Upaya Peningkatan Good Corporate Governance (GCG) : Studi Kasus Grup Rumah Sakit Ramsay Health Care Indonesia”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan, peran, dan penerapan RUPS, dewan direksi, audit internal, dewan

komisaris, komite audit, pengendalian internal, dan manajemen risiko dalam Ramsay Health Care Indonesia sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan diatas dirangkumkan penulis dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maylina Pramono Sari dan Raharja (Tidak dicantumkan peneliti, diakses penulis Oktober 2012)	1. Variable bebas : Peran Audit Internal 2. Variabel Terikat : Good Corporate Governance (GCG)	Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran auditor internal terhadap Good Corporate Governance (GCG)
2	Suryo Pratolo (2007)	GCG & Kinerja BUMN di Indonesia : Aspek Audit Manajemen & Pengendalian Internal sebagai Variabel Eksogen serta tinjauannya pada jenis perusahaan	Audit Manajemen & Pengendalian Intern Saling Mendukung dalam rangka mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip GCG & kinerja perusahaan
3	Davies Marlene (2008)	Variable bebas : Komite Audit dan Fungsi Audit Internal	Ditemukan bahwa hubungan kerja antara komite audit dan audit internal bergantung kepada kepribadian individu, proses otoritas pemerintahan, dan kesediaan semua pihak untuk terlibat di dalam peran tanggung jawab komite audit
4	Lahu Kurnia (2011)	Variabel Bebas : Internal Audit Variabel Terikat : Good Corporate Governanve	Hasil peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada PT Kimia Farma Tbk.
5	H.A.Rodi Kartamulja (2005)	Variabel bebas : Peran Komite Audit, Pengendalian Intern, Audit Intern Variabel terikat : Good Corporate Governance (GCG)	Peranan komite audit mempengaruhi pengendalian intern serta peranan komite audit dan pengendalian intern mempengaruhi internal audit secara simultan dan parsial
6	Cut ImamaMuttaqin (2004)	Variabel bebas : Faktor-Faktor Internal Audit Variable terikat : Good Corporate Governance (GCG)	Ditemukan bahwa factor-faktor internal audit bersama-sama (simultan) dan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan GCG pada BUMN
7	Efrizal Syofyan	Variable bebas : Peran Komite Audit, Direksi dan Internal Audit Variabel terikat : Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)	Komite Audit, Direksi, dan Internal Audit bersama-sama (simultan) berpengaruh pada tingkat kategori sedang (67,46%) terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG

Sumber : Data Olahan Peneliti (2013)

8	W.Wendaa (2008)	Variabel bebas : <i>Internal Control</i> Variabel terikat : <i>Internal Control</i> , Prosedur Penggajian, Penggajian, Audit.	Ditemukan bahwa keandalan <i>internal control</i> sangat diperlukan dalam perusahaan, untuk mencegah kecurangan dan penyelewengan yang mungkin terjadi.
9	Amartiwı Windrya (2012)	Variabel bebas : Peran dan Penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal dan Komite Audit Variabel terikat : Good Corporate Governance (GCG)	Ditemukan bahwa keberadaan, peran, dan penerapan RUPS, dewan direksi, audit internal, dewan komisaris, komite audit, pengendalian internal, dan manajemen risiko dalam Ramsay Health Care Indonesia sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di Indonesia.

Sumber : Data olahan peneliti (2013)

2.7 Hubungan antara Variabel Independen dan Dependen

2.7.1 Internal Audit dan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu, dapat menjelaskan keterkaitan antara dua variabel yang terdiri dari variabel bebas (internal audit) dan variabel terikat (*good corporate governance*). Pertama, penelitian dari Sari dan Raharja (2012). Keterkaitan antara internal audit dan *good corporate governance* dapat dilihat dari hasil pengujian yang sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian internal suatu perusahaan dapat dilakukan oleh Departemen Audit Internal. Selain itu audit internal dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas dan kepatuhan manajemen terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, auditor internal dipandang memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan penciptaan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance* (GCG)). Kedua, penelitian oleh Lahu Kurnia (2011) mendapatkan hasil pengujian dan pembahasan bahwa peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Kimia Farma Tbk. Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya *good corporate governance* yang baik dapat terlaksana dengan adanya pengawasan dari internal auditor. Dan dari berbagai uraian penelitian terdahulu membuat penulis menyimpulkan bahwa hipotesis yang dapat diajukan adalah :

1. H_{01} = Tidak Terdapat pengaruh internal auditor terhadap *good corporate governance*
2. H_{a1} = Terdapat pengaruh internal auditor terhadap *good corporate governance*

2.7.2 Penerapan Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance*

Keterkaitan antar variabel bebas (penerapan pengendalian internal) terhadap variabel terikat (*good corporate governance*) dapat dilihat pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian oleh Suryo Pratolo (2007), yaitu menemukan hasil bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suropto Samid (1996) dan penelitian Hiro Tugiman (2001). Temuan ini menunjukkan bahwa pada BUMN di Indonesia, dalam rangka peningkatan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan perlu dilakukan peningkatan pengendalian intern. Hal tersebut didukung oleh temuan secara deskriptif bahwa tingkat pengendalian intern, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan kinerja perusahaan BUMN di Indonesia relatif belum maksimal. Selain itu terdapat penelitian terdahulu dari H.A.Rodi Kartamulja (2005), hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan komite audit mempengaruhi pengendalian intern serta peranan komite audit dan pengendalian intern mempengaruhi internal audit secara simultan dan parsial. Selain itu, peranan Komite Audit, internal control, dan internal audit secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi GCG, sedangkan secara parsial hanya internal audit yang mempengaruhi GCG. Dari beberapa uraian hasil penelitian terdahulu maka membuat penulis menyimpulkan bahwa hipotesis yang akan diajukan adalah :

1. H_{0_2} = Terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*
2. H_{a_2} = Tidak terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*

2.7.3 Internal Audit, Penerapan Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance*

Keterkaitan antar kedua variabel bebas (internal audit dan penerapan pengendalian internal) terhadap variabel terikat (GCG) dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Amartiwi Windrya (2012), menjelaskan bahwa peran dan penerapan pengendalian internal, audit internal dan komite audit dalam perusahaan dapat meningkatkan *good corporate governance*. Hal ini membuktikan bahwa semakin efektif internal audit dan penerapan pengendalian internal di perusahaan maka semakin efektif pula penerapan *good corporate governance* yang berada di suatu perusahaan. Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu maka penulis menyimpulkan bahwa hipotesis yang akan diajukan adalah :

1. H_{0_3} = Tidak Terdapat pengaruh simultan antara internal audit serta penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*
2. H_{a_3} = Terdapat pengaruh simultan antara internal audit serta penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*

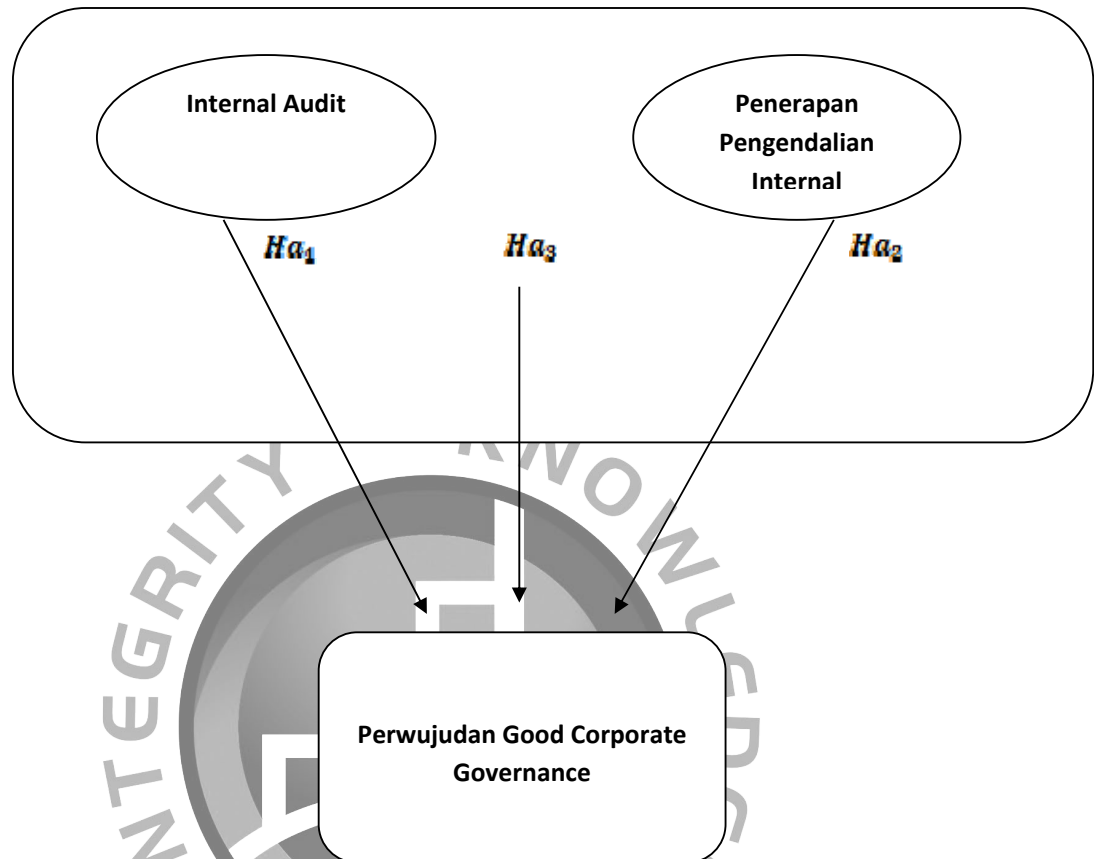
2.8 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sudah dikemukakan di atas, tahapan penelitian yang akan dilakukan antara lain:

1. Pengumpulan data primer dari kuesioner yang disebar oleh penulis pada internal auditor yang bekerja pada BLU UT (Universitas Terbuka) dan pengumpulan data sekunder yang didapat dari data-data ataupun informasi yang tersedia dari penelitian sebelumnya, dalam bentuk jurnal, ataupun dalam bentuk literature, serta buku-buku pendukung yang menunjang.
2. Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Linier Regression Analysis*). Dalam persamaan regresi linier berganda pengujian dilakukan antara variabel independen yaitu, internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu, *good corporate governance*.
3. Untuk menguji kualitas data yang digunakan, dilakukan uji validitas dan realibilitas. Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.
4. Dilanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (pengujian secara parsial), uji F (pengujian secara simultan), dan koefisien determinasi.
5. Menginterpretasikan hasil pengujian untuk diambil kesimpulan dan menentukan keterbatasan dalam penelitian dan saran terkait dengan hasil penelitian.

Berdasarkan tahapan pengujian yang telah dijelaskan maka, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



Sumber : Data olahan peneliti (2013)

Rerangka penelitian diatas menjelaskan mengenai pengaruh internal audit (variabel bebas X_1) terhadap *good corporate governance* (variabel terikat Y). Selain itu dijelaskan pula mengenai pengaruh penerapan pengendalian internal (variabel bebas X_2) terhadap *good corporate governance* (variabel terikat Y). Serta yang terakhir mengenai pengaruh X_1 dan X_2 secara bersamaan terhadap Y.

Good Corporate Governance merupakan suatu pola kinerja yang baik dalam suatu instansi untuk mencapai tujuan instansi secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan para *stakeholder*. Dengan adanya GCG di dalam suatu instansi, maka tujuan dari instansi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan keputusan

menteri BUMN nomor: KEP 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN, elemen-elemen GCG yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran.

Masing-masing elemen GCG memiliki spesifikasi tersendiri, yang harus terpenuhi semua. Transparansi berkenaan dengan publikasi atas informasi dan pengambilan keputusan. Kemandirian berkaitan dengan pengelolaan instansi tanpa benturan pihak manapun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi dari instansi dalam operasionalnya. Pertanggungjawaban berkaitan dengan pengelolaan instansi yang sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, sedangkan elemen kewajaran lebih berfokus pada keadilan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*.

BLU memiliki fleksibilitas di dalam pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sini jelas terlihat bahwa BLU seharusnya lebih mampu mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Sehingga, BLU dituntut untuk mampu mencapai GCG dalam instansinya. Dimana salah satu elemen dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengharuskan adanya audit internal dalam instansi pemerintah. Audit internal yang dimaksud yaitu dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). Sesuai dengan PP 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 35 angka 1 yang menyebutkan bahwa Pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLU. Selain itu organisasi, lembaga, atau perusahaan termasuk BLU yang dibentuk dari komponen-komponen sistem yang masing-masing memiliki kepentingan sangat memerlukan adanya pengendalian intern. Pengendalian intern ini dimaksudkan untuk mencegah secara dini tindakan yang akan

menyimpang dari pencapaian tujuan organisasi, lembaga, atau perusahaan. Tujuan tersebut (tujuan lembaga, organisasi, perusahaan) merupakan tujuan bersama diantara anggota-anggota yang tergabung pada organisasi, lembaga, atau perusahaan.

Ketika suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan dapat melaksanakan pengendalian intern secara baik, maka organisasi, lembaga, atau perusahaan tersebut dapat saja tidak membentuk suatu bagian yang diberi tugas khusus untuk pengendalian tersebut. Namun perlu di pahami bahwa pembentukan bagian atau unit yang menangani tentang pengendalian intern tersebut bukan hanya karena adanya penyimpangan yang terjadi pada organisasi, lembaga, atau perusahaan. Pembentukan bagian atau unit yang menangani pengendalian intern tersebut juga dilakukan karena adanya tuntutan peraturan.

Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* sangatlah besar, karena telah diketahui bahwa peran internal audit dan penerapan pengendalian internal adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance*. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan peran audit internal serta penerapan pengendalian internal yang efektif maka akan meningkatkan keefektifan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2.9 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan masalah yang telah diungkapkan di atas, diantaranya

1. Variabel internal audit (independen),

Menurut Agoes (2004 : 221) internal audit (pemeriksaan intern) yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik

terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

2. Variabel penerapan pengendalian internal (independen),

Menurut Robert Moeller (2009) adalah pengendalian internal adalah proses, yang diimplementasikan oleh manajemen, yang dirancang untuk melakukan penilaian yang cukup bagi reabilitas tingkat kepercayaan keuangan dan informasi operasional, kepatuhan terhadap peraturan, rencana prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku, pengamanan asset, efisiensi operasional, pencapaian dari misi yang telah ditetapkan, tujuan, dan program operasi perusahaan, nilai integritas dan etika.

3. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG)

James D. Wolfensohn mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan pada perusahaan haruslah dapat dipertanggung jawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. **H_{01}** = Tidak Terdapat pengaruh internal auditor terhadap *good corporate governance*

2. **H_{a1}** = Terdapat pengaruh internal auditor terhadap *good corporate governance*

3. **H_{02}** = Tidak Terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*

4. **H₀₂** = Terdapat pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*
5. **H₀₃** = Tidak Terdapat pengaruh simultan antara internal audit serta penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*
6. **H_{a3}** = Terdapat pengaruh simultan antara internal audit serta penerapan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

3.1.1 Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance* di dalam entitas Badan Layanan Umum (BLU). Dalam hal ini, peneliti memilih BLU Universitas Terbuka Pusat serta UPBJJ Universitas Terbuka yang bertempat di Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada internal auditor yang merupakan responden penelitian, yang bekerja di Universitas Terbuka pusat serta UPBJJ (Unit Pembelajaran Jarak Jauh) Universitas Terbuka Bogor.

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat kedudukan objek penelitian, yaitu BLU Universitas Terbuka Kantor Pusat berlokasi di Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan 15418, Banten. Serta UPBJJ Universitas Terbuka Bogor, yang terletak di Jl. Julang No.7, Tanah Sareal, Bogor 16161. Penulis telah melakukan permohonan izin pada pihak Satuan Pengawas Intern tersebut, untuk dapat mengakses data yang diperlukan serta menjalin hubungan pada pihak tersebut, untuk melakukan penyebaran kuesioner pada internal auditor yang bekerja di kedua lokasi tersebut.

3.2 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek penelitian dan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian atau gejala yang diteliti (Suryabrata. 2005: 72). Menurut Arikunto (2006:116) variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi obyek penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain, dapat pula dikatakan bahwa variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain yang ingin diketahui (Azwar, 2007: 62). Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Arikunto, 2006: 119).

3.2.2 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel utama yang menjadi perhatian dan tujuan seorang peneliti. Dijelaskan bahwa seorang peneliti memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan memberikan gambaran atas variabel terikat yang diteliti. Dikatakan bahwa seorang peneliti harus dapat memprediksi variabel terikat dalam hal hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel bebas, atau peneliti harus dapat menjelaskan variasi-variabel atau perubahan yang terjadi di dalam variabel terikat tersebut (Sekaran dan Bougie (2010 ; 70)). Di dalam penelitian ini peneliti menetapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel terikat penelitian dan dilambangkan dengan notasi statistik yaitu Y.

3.2.3 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel di dalam penelitian yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas, dapat menjadi pengaruh yang negatif maupun pengaruh positif (Sekaran dan Bougie 2010 ; 72)). Di dalam penelitian ini ditetapkan bahwa variabel bebas yang diteliti terdiri dari dua variabel, yaitu internal audit (dilambangkan dengan x_1) dan pengendalian internal (dilambangkan x_2).

3.2.4 Operasional Variabel

Sekaran dan Bougie (2010 ; 127) memberikan penjelasan mengenai operasionalisasi variabel, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan translasi konsep penelitian

sehingga dapat diobservasi oleh peneliti dan elemen yang ada di dalam konsep juga dapat diukur. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan konsep penelitian. Pada penelitian ini didasarkan pada tiga variable berikut :

1. *Good Corporate Governance (GCG) :*

GCG merupakan variable terikat penelitian. Di dalam penelitian ini GCG diimplementasikan melalui prinsip-prinsip GCG melalui Daniri Achmad (2005). Secara umum ada lima prinsip dasar GCG yaitu : *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* yang untuk memudahkan dapat kita akronimkan menjadi TARIF. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : *Transparency* (Keterbukaan Informasi), *transparency* bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. *Accountability* (Akuntabilitas), Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. *Responsibilitas* (Pertanggungjawaban), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku disini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. *Independency* (Kemandirian), independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan

sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mengoperasionalisasikan kelima prinsip GCG tersebut, penulis menggunakan kusioner penelitian terdahulu yaitu oleh Sari dan Raharja (2012) sebagai dasar operasioanlisasi GCG. Kelima prinsip tersebut dituangkan dalam 26 butir pernyataan dalam kuesioner. Dimana indikator pernyataan dibagi menjadi :

1. Transparansi

- a. BLU menyediakan informasi secara tepat waktu
- b. BLU menyediakan informasi yang memadai
- c. BLU menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pemegang saham
- d. Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi sasaran usahan kondisi keuangan, susunan organisasi, dan kejadian-kejadian penting yang mempengaruhi kondisi BLU

2. Akuntabilitas

- a. Masing-masing organ di dalam instansi menghindari adanya saling lempar tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya
- b. Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ di dalam instansi dan semua karyawan ditetapkan secara jelas selaras dengan visi, misi, dan strategi instansi
- c. Setiap organ instansi dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab antara yang satu dengan yang lainnya.

3. Pertanggung jawaban

- a. Tetap menjaga kerahasiaan instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku berupa hak-hak pribadi setiap karyawan.

- b. Setiap kebijakan instansi didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada internal internal instansi maupun pihak yang berkepentingan.
 - c. Setiap organ instansi selalu berpegang teguh pada etika bisnis dan pedoman perilaku ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
 - d. Setiap organ instansi dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian.
 - e. Adanya kepatuhan terhadap undang-undang BLU
 - f. Adanya kepatuhan terhadap Anggaran Dasar
 - g. Adanya kepatuhan terhadap kepatuhan instansi
 - h. Melaksanakan tanggung jawab social baik yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan (terutama lingkungan sekitar BLU)
4. Kemandirian
- a. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, setiap organ instansi menghindari adanya dominasi dari pihak manapun.
 - b. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, setiap organ instansi bebas dari benturan kepentingan ataupun pengaruh dari elemen internal instansi itu sendiri.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, setiap organ instansi bebas dari benturan kepentingan ataupun pengaruh dari elemen eksternal instansi itu sendiri.
 - d. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif
 - e. System pengendalian internal berjalan efektif

5. Kewajaran

- a. Adanya sistem *reward* dan *punishment* terhadap kinerja yang dihasilkan oleh setiap organ instansi
- b. Instansi memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan dan pendapat bagi kepentingan instansi
- c. Instansi memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kontribusinya dan manfaat yang mereka berikan kepada perusahaan
- d. Instansi memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, dalam hal berkarir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi tiap organ untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, serta golongan fisik.
- e. Instansi telah menetapkan kebijakan kompensasi positif terhadap pegawai yang berhasil.
- f. Instansi telah menetapkan kebijakan kompensasi negatif terhadap pegawai yang memiliki kinerja buruk.

2. Internal Audit

Variabel penelitian bebas yang pertama adalah internal audit. Audit internal dapat diukur melalui 9 indikator pernyataan dalam kuesioner yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Sari dan Raharja (2012), yaitu :

- a. Peranan dan sasaran SPI berfokus pada area dari dampak berbagai risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis instansi
- b. SPI bertanggung jawab kepada pimpinan utama BLU

- c. SPI memiliki akses yang tidak terbatas (4-12 kali setahun) terhadap para anggota direksi dan berkomunikasi informal dengan direksi, serta menjadi bagian dalam rapat-rapat pimpinan
- d. Independensi SPI diakui pimpinan sebagai kunci bagi efektivitas SPI
- e. SPI juga terlibat dalam revisi penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)
- f. Laporan SPI juga mencakup analisis biaya manfaat dari rekomendasi, *assessment* terhadap semua aspek lingkungan pengendalian dan focus audit kedepan.
- g. Hasil *assessment* risiko oleh SPI didiskusikan dengan manajemen dan diperbandingkan dengan hasil *assessment* risiko yang dibuat.

3. Penerapan Pengendalian Internal

Variabel penelitian bebas yang kedua adalah penerapan pengendalian internal. Menurut Robert Moeller (2009) pengendalian internal adalah proses yang diimplementasikan oleh manajemen yang dirancang untuk melakukan penilaian yang cukup bagi reabilitas tingkat kepercayaan keuangan dan informasi operasional, kepatuhan terhadap peraturan, rencana prosedur, hukum, dan regulasi yang berlaku, pengamanan asset, efisiensi operasional, pencapaian dari misi yang telah ditetapkan, tujuan, dan program operasi perusahaan, nilai integritas dan etika. Operasionalisasi penerapan pengendalian internal dapat diukur melalui lima komponen pengendalian internal menurut Moeller (2009), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Kelima komponen tersebut di tuangkan dalam 32 butir pernyataan dalam kuesioner yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu, Wenda(2012). Diantaranya :

- 1. BLU memiliki petunjuk pelaksanaan mengenai tata tertib dan disiplin yang dikomunikasikan kepada pegawai

2. BLU menerapkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
3. Penerimaan calon pegawai didasarkan atas keahlian, pendidikan, kepribadian, dan pengalaman kerja
4. Dilakukannya tes untuk menilai kemampuan calon pegawai
5. Instansi memiliki peraturan yang mengatur tentang kewajiban pegawai, hak pegawai, dan larangan bagi pegawai yang dinyatakan secara tertulis
6. Peraturan kerja telah diterapkan secara konsisten pada semua pegawai
7. Manajemen menyadari pentingnya pengendalian internal
8. Instansi memiliki struktur organisasi
9. Dalam struktur organisasi menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi
10. Pemisahan fungsi yang ada telah memadai
11. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mendukung pencapaian tujuan BLU
12. Pimpinan BLU dapat memastikan bahwa tujuan BLU dapat dipahami oleh pegawai
13. Terdapat suatu bagian khusus yang berwenang dan bertanggung jawab atas masalah kepegawaian
14. Apakah manajemen menetapkan risiko sebagai bagian dari pengendalian intern

Pengukuran yang digunakan untuk mengolah data yang didapat dari kuesioner adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan pengukuran yang didesign untuk menguji seberapa kuat subjek sampel menyatakan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang tertera di dalam kuesioner, melalui lima alternatif jawaban (Sekaran dan Bougie (2010;152)).

Di dalam kuesioner penelitian, peneliti meminta responden untuk menjawab pernyataan dengan cara mengisi alternatif jawaban yang tersedia didalam kuesioner

dengan memberikan tanda *checklist* (√). Berikut ini adalah bobot alternatif jawaban menurut Sekaran dan Bougie (2010;152) :

Tabel 3.3

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju dan Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5

Sumber : Sekaran dan Bougie (2010)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Tinjauan kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur dan buku-buku serta referensi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.

2. Tinjauan Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data langsung di lapangan melalui kuesioner.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari dimensi waktu penelitian adalah *data cross-sectional*, yaitu data yang dikumpulkan satu kali saja, untuk satu periode waktu (Sekaran dan Bougie, 2010;119).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti, dimana data tersebut merupakan data yang terkait dengan variable penelitian, untuk kepentingan tujuan penelitian, yang kemudian data tersebut diolah oleh peneliti sehingga menghasilkan informasi mengenai hasil penelitian. Data primer pada penelitian ini merupakan kuesioner, yang disebar penulis pada internal auditor yang berkedudukan sebagai Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bekerja pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Terbuka.

2. Data Sekunder

Menurut Sekaran dan Bougie (2010) data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, kemudian dianalisis garis besar dan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari data-data ataupun informasi yang tersedia dari penelitian sebelumnya, dalam bentuk jurnal, ataupun dalam bentuk *literature*, serta buku-buku pendukung yang menunjang, dimana materi yang diangkat di dalamnya memuat bahasan dan mengangkat permasalahan dengan tema yang relevan dengan penelitian penulis serta teori-teori terkait.

3.4.3 Populasi Penelitian

Sekaran dan Bougie (2010) menyatakan bahwa populasi merupakan penunjukan pada sekelompok orang, kejadian, atau sesuatu hal yang diinginkan oleh peneliti untuk diteliti dan diinvestigasi sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 43 orang internal auditor yang bekerja di Universitas Terbuka.

3.5 Model dan Teknik Analisis Data

3.5.1 Model Analisis Data

Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*). Purbayu (2005) mengemukakan bahwa korelasi berganda adalah hubungan dari beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Jika suatu variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, hubungan kedua variabel tersebut disebut analisis regresi berganda (Wahid Sulaiman, 2004: 80).

Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Good Corporate Governance.

X_1 : Internal Audit.

X_2 : pengendalian internal.

α : Konstanta.

β : Koefisien Regresi.

e : Error.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance* (GCG).

3.5.2 Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat kebenaran/keabsahan

yang tinggi). Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan reabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*).

1. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Purbayu, 2005: 247). Uji validitas ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrument. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Nonparametric Correlations*. Uji ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dan total skor.

2. Uji Realibilitas

Realibilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan (Purbayu, 2005: 251). Realibilitas suatu variabel yang dibentuk dari daftar pertanyaan dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > dari 0,60. Ketentuan penerimaan maupun penolakan hipotesis uji reabilitas adalah sebagai berikut :

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika nilai cronbach's alpha variabel penelitian > 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa item pernyataan variabel di dalam penelitian bersifat reliable, dan responden menghasilkan jawaban yang sama sebesar angka (berupa persentase) sebesar cronbach alpha yang didapat apabila pernyataan di dalam penelitian diujikan kembali.
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai cronbach's alpha variabel penelitian < 0,60. Hal ini menandakan bahwa item pernyataan variabel di dalam

penelitian bersifat tidak *reliable*. Apabila ini terjadi, maka dinyatakan jawaban responden tidaklah konsisten dengan pernyataan kuesioner, sehingga hasil kuesioner tidak dapat diujikan kembali.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik Model Regresi Berganda

3.5.3.1 Uji Asumsi Klasik Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang ada, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi yang baik adalah apabila data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) penelitian terdistribusi normal Sunyoto (2011 ; 84).

Pembentukan hipotesis untuk uji asumsi klasik normalitas terdiri dari :

Ho = Data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi tidak terdistribusi normal.

Ha = Data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi terdistribusi normal.

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik normalitas dilakukan melalui uji *Kolmogrov-Smirnov*. Suyoto (2011 ; 84) menjelaskan bahwa uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar angka signifikansi dari hasil unstandardized residual yang diuji menggunakan Kolmogrov-Smirnov. Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis :

1. Ho ditolak dan Ha diterima apabila nilai signifikansi *unstandardized residual* yang dihasilkan dari uji *Kolmogrov-Smirnov* $> 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) terdistribusi normal.
2. Ho diterima dan Ha ditolak apabila nilai signifikansi *unstandardized residual* yang dihasilkan dari uji *Kolmogrov-Smirnov* $< 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa data variabel

bebas (X) dan variabel terikat (Y) penelitian tidak terdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan penilaian outlier, agar data dapat terdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Uji ini mengukur tingkat keeratan (asosiasi) hubungan / pengaruh antara variabel-variabel bebas pada model regresi berganda. Menurut Sunyoto (2011 ; 79) model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah multikolinieritas. Pembentukan hipotesis atas uji ini terdiri dari :

1. **Ho = Terjadi multikolinieritas antara Internal Audit (X1) dan Penerapan Pengendalian Internal (X2), sehingga antara X1 dan X2 memiliki tingkat kesetaraan yang tinggi.**
2. **Ha = tidak terjadi multikolinieritas antara Internal Audit (X1) dan Penerapan Pengendalian Internal (X2), sehingga antara X1 dan X2 memiliki tingkat kesetaraan yang rendah.**

Sunyoto (2011 ; 79), uji sumsi multikolinieritas dihitung menggunakan nilai *tolerance*, yaitu besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik, dilambangkan dengan (a) serta dengan menggunakan nilai *variance inflaction factor* (VIF), yaitu nilai inflasi penyimpangan baku kuadrat. Kedua perhitungan ini digabungkan untuk mencari nilainya, sebagai berikut :

1. Besarnya nilai *tolerance* (a) adalah $a = 1/VIF$
2. Besarnya nilai *variance inflaction factor* (VIF) adalah $VIF = 1/a$

Berikut ini adalah criteria pengujian untuk nilai *tolerance* dan VIF adalah :

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika nilai a hitung $> a$ dan nilai VIF hitung $< VIF$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas.

2. H_0 diterima dan H_a ditolak jika nilai t hitung $< t_{\alpha}$ dan nilai VIF hitung $< VIF_{\alpha}$. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel bebas mengalami multikolinieritas.

3.5.3.3 Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Untuk menguji sama atau tidaknya varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain digunakan uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Jika residualnya memiliki varians yang tidak sama maka pada persamaan regresi terjadi heteroskedastisitas, sedangkan persamaan regresi yang baik, adalah persamaan regresi yang tidak mengalami heteroskedastisitas, namun bersifat homoskedastisitas, yaitu residual yang variansnya sama (Sunyoto (2011 ; 82)). Berikut adalah hipotesis untuk uji heteroskedastisitas :

H_0 = Terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi berganda, sehingga residual persamaan regresi memiliki varians yang tidak sama.

H_a = Tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi berganda, dan persamaan regresi berganda bersifat homoskedastisitas, sehingga residual persamaan regresi memiliki varians yang sama.

Pengujian yang dilakukan pada uji ini sama seperti apa yang dilakukan pada uji normalitas. Kemudian, dilakukan kembali pengujian dengan alat bantu *analyze* pada program SPSS yang menghasilkan output berupa nilai signifikansi t dan F . Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila, nilai signifikansi t dan $F > \alpha$ (0,05).

Berikut adalah ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis :

1. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila nilai signifikansi t dan F yang dihasilkan $> 0,05$. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi
2. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila nilai signifikansi t dan F yang dihasilkan $< 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada persamaan re

3.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh internal audit dan penerapan pengendalian internal sebagai variabel independen terhadap *good corporate governance* sebagai variabel dependen. Untuk menguji hipotesis mengenai internal audit dan penerapan pengendalian internal secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap *good corporate governance*, digunakan pengujian hipotesis secara simultan dengan uji F dan secara parsial dengan uji t.

3.6.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan signifikansi masing-masing koefisien regresi dari model regresi linier berganda di atas yaitu b_1 dan b_2 , secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat (Y), Sunyoto (2011 ; 13). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-P-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan P adalah jumlah variabel bebas.

Berikut dijabarkan langkah-langkah dalam uji parsial (Sunyoto, 2011 ; 13) :

1. Pengujian koefisien regresi internal audit (b_1) :

a. Menentukan H_0 dan H_a *two tailed-test* :

$H_0 : b_1 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan internal audit terhadap GCG)

$H_a : b_1 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan internal audit terhadap GCG)

b. Menentukan *level of significance* (α)

level of significance (α) ditentukan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Peneliti menentukan *level of significance* (α) sebesar 5% sesuai dengan tingkat signifikansi yang umumnya digunakan secara konvensional di dalam penelitian bisnis (Sekaran dan Bougie (2010)).

c. Kriteria pengujian :

Menggunakan t hitung (nilai signifikansi) :

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika t hitung (nilai signifikansi) $< \alpha$ (0,05)
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika t hitung $> \alpha$ (0,05)

Melakukan perbandingan antara t hitung dengan t tabel.

Untuk melakukan perhitungan t tabel, harus mengetahui besaran degree of freedom (df), dengan rumus $df = n - P - 1$. Dimana :

n = Jumlah responden

P = Jumlah variabel bebas X

Kriteria penerimaannya adalah sebagai berikut :

1. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila t hitung $> t$ tabel, atau $-t$ hitung $< -t$ hitung
2. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila t hitung $< t$ tabel, atau t hitung $> -t$ tabel

2. Pengujian Koefisiensi regresi penerapan pengendalian internal (b_2)

- a. Menentukan H_0 dan H_a *two tailed-test* :

$H_0 : b_2 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penerapan pengendalian internal terhadap GCG)

$H_a : b_2 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan penerapan pengendalian internal terhadap GCG)

b. Menentukan level of significance (α)

Level of significance (α) ditentukan oleh peneliti dalam pengumpulan data.

Peneliti menentukan level of significance (α) sebesar 5%.

c. Kriteria pengujian

Menggunakan t hitung (melihat signifikansi) :

1. H_0 ditolak dan H_a diterima jika t hitung (nilai signifikansi) (hasil output SPSS) < α (0,05)

2. H_0 diterima dan H_a ditolak jika t hitung > α (0,05)

Melakukan perbandingan antara t hitung dengan t tabel.

Untuk melakukan perhitungan t tabel, harus mengetahui besaran *degree of freedom* (df), dengan rumus $df = n - P - 1$. Dimana :

n = Jumlah responden

P = Jumlah variabel bebas X

Kriteria penerimaannya adalah sebagai berikut :

1. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila t hitung > t tabel, atau -t hitung < -t tabel

2. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila t hitung < t tabel, atau t hitung > -t tabel

3.6.2 Uji Simultan (Uji F)

Sunyoto (2011 ; 16) menjelaskan bahwa pengujian simultan merupakan pengujian yang mencakup dua variabel bebas penelitian (yaitu internal audit dan penerapan pengendalian internal) terhadap variabel terikat penelitian (yaitu, *Good Corporate Governance*). Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variable-variabel independen (bebas) terhadap variable dependen (terikat). Berikut merupakan langkah-langkah pengujian secara simultan :

1. Menentukan H_0 dan H_a :

$H_0 : b_1, b_2 = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang signifikan internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance*)

$H_a : b_1, b_2 \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang signifikan internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance*)

2. Menentukan *level of significance* (α)

level of significance (α) ditentukan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Peneliti menentukan *level of significance* (α) sebesar 5%. Sunyoto (2011 ; 17) menjelaskan bahwa Nilai F tabel ditentukan dengan menentukan besar degree of freedom (df) pembilang (numerator), dimana numerator = banyaknya variabel bebas. Sedangkan df penyebut (denominator) didapat dengan rumus $df = n - P - 1$. Dimana :

n = Jumlah data atau responden

P = Jumlah variabel bebas (X)

3. Kriteria pengujian

Uji F merupakan uji yang dilakukan pada satu sisi kanan (Sunyoto (2011 ; 17)). Uji F ini dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Dasar penerimaan dan penolakan H_0 adalah sebagai berikut :

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

2. Menggunakan p -value :

Berikut adalah kriteria penerimaan dan penolakan H_0 :

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $p\text{-value} < \alpha$
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $p\text{-value} > \alpha$

3.6.2.1 Pengujian koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian menerangkan variasi yang dimiliki oleh variabel terikat (*dependent*), Ghozali (2009 ; 87). Nilai *adjusted R square* yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel *independent* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependent*.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran umum obyek penelitian mengenai BLU pada Universitas Terbuka, sebagai berikut :

4.1.2 Gambaran Umum BLU Universitas Terbuka (UT)

Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984. UT didirikan dengan tujuan:

1. Memberikan kesempatan yang luas bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing, di mana pun tempat tinggalnya, untuk memperoleh pendidikan tinggi;
2. Memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka, yang karena bekerja atau karena alasan lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka;
3. Mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan nyata pembangunan yang belum banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi lain.

UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar,

waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat).

4.1.3 Visi dan Misi BLU Universitas Terbuka

Pada saat pemerintah Indonesia mendirikan UT tahun 1984, UT mengemban dua misi utama, yaitu: (1) memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, dan (2) meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru sampai dengan jenjang yang dipersyaratkan. Dalam perjalanan UT sejak didirikan hingga sekarang, telah terjadi banyak perubahan baik secara internal maupun eksternal. Berbagai upaya dilakukan untuk menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, termasuk perumusan ulang, penajaman, serta perluasan kedua misi awal tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemerintah dan masyarakat luas.

Perkembangan lingkungan eksternal ke depan diperkirakan akan tetap menempatkan pendidikan tinggi pada posisi sentral dalam pengembangan SDM suatu bangsa. Di samping itu, semakin kaburnya batas-batas wilayah suatu negara mendorong terjadinya migrasi baik itu informasi, pengetahuan, orang, maupun barang secara lintas negara. Akibatnya secara tidak langsung akan menimbulkan terjadinya saling ketergantungan antar-negara atau antarinstansi termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk dapat masuk ke dalam jaringan global perguruan tinggi (PT), UT harus memiliki kualitas akademik yang setara atau lebih tinggi dari anggota jaringan PT tersebut, di samping tetap mengemban mandatnya sebagai institusi pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ). Berdasarkan perkembangan lingkungan dan pemikiran tersebut maka visi UT dirumuskan sebagai berikut:

Pada tahun 2021, UT telah menjadi institusi PTTJJ yang berkualitas dunia dalam menghasilkan produk akademik pendidikan tinggi serta dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan penyebaran informasi PTTJJ.

Penetapan tahun 2021 sebagai tahun pencapaian Renstra didasarkan pemikiran bahwa tahun capaian Renstra saat ini adalah tahun 2020. Agar program-program yang dilaksanakan dapat berkesinambungan tanpa harus mengubah titik tujuan sasaran pencapaian Renstra dan disesuaikan periode masa jabatan Rektor, maka target capaian Renstra ini ditetapkan jatuh pada tahun 2021. Menjadi institusi PTTJJ berkualitas dunia mengandung makna bahwa penyelenggaraan UT telah memenuhi standar penyelenggaraan terbaik PTTJJ yang diakui, baik oleh komunitas maupun lembaga-lembaga atau asosiasi perguruan tinggi jarak jauh tingkat dunia. Sebagai konsekuensi dan sesuai dengan prinsip sistem PTTJJ, UT juga menghasilkan berbagai produk akademik berkualitas tinggi yang terstandar. Pengertian produk yang berkualitas tinggi adalah produk akademik yang secara substansi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan tetap terjaga relevansinya dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Pengertian terstandar adalah kualitas produk akademik dijamin sama di setiap tempat penyelenggaraan PTTJJ.

Sistem pendidikan terbuka mengandung arti bahwa UT dalam menyelenggarakan pendidikan mengutamakan dan menekankan keterbukaan sistem yang merupakan operasionalisasi filosofi pendidikan sepanjang hayat (tanpa seleksi masuk, tanpa batasan usia, tanpa batasan lokasi geografis, tidak mempersyaratkan latar belakang pendidikan tertentu, tanpa batasan tahun ijazah SLTA, tanpa batasan masa studi, serta bersifat *multi entry-multi exit*). Sementara itu dengan sistem pendidikan jarak jauh berarti UT mendorong terjadinya kemandirian belajar bagi peserta didik agar mampu mengarahkan

diri sendiri dalam mengorganisasikan proses belajar dan dalam memanfaatkan layanan bantuan belajar yang disediakan oleh UT. Dengan demikian, sistem PTTJJ yang diterapkan UT menghasilkan fleksibilitas sistem dan menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan tinggi sesuai misi UT. Dengan demikian UT harus memiliki sistem penyelenggaraan yang adaptif terhadap perubahan dalam masyarakat.

Misi yang diamanatkan kepada UT melalui Keppres Nomor 41 Tahun 1984, pada prinsipnya masih tetap menjadi misi utama UT namun, selaras dengan Tridharma PT dan perkembangan lingkungan strategis maka rumusan misi UT disempurnakan menjadi sebagai berikut.

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh.
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

4.1.4 Maksud dan Tujuan Universitas Terbuka

Untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi, tujuan penyelenggaraan UT dirumuskan sebagai berikut :

- a) Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ.
- b) Menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global.

- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*).
- d) Menghasilkan produk-produk akademik dalam bidang PJJ, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya.
- e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem PJJ, khususnya PTTJJ.
- f) Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.
- g) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata.

4.1.5 Produk dan Jasa

Produk/jasa yang diberikan oleh UT tetap berpegang kepada tujuan didirikannya UT, yaitu menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ). Pada saat ini terdapat 4 (empat) fakultas dan 1 (satu) program Pascasarjana, dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) program studi yaitu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) program strata satu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi (FEKON), Program Pasca Sarjana (PPs).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saat ini UT telah mengembangkan program berkelanjutan (*Continuing Education*). Saat ini telah ditawarkan 3 (tiga) program *Continuing Education* dan program ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.1.6 Budaya BLU Universitas Terbuka

Budaya organisasi terdiri dari seperangkat sistem nilai dan asumsi yang menjadi dasar setiap pegawai UT dalam bekerja. Sistem nilai ini dibangun dengan tujuan agar seluruh pegawai memiliki sikap dan keyakinan yang akan membentuk perilaku pegawai dalam bekerja. Untuk mencapai keunggulan sebagai PTTJJ, baik dalam bidang penyelenggaraan maupun dalam bidang akademik, sistem UT perlu ditopang oleh adanya kemampuan dan kesempatan untuk melakukan inovasi produk dan perubahan manajemen tatkala diperlukan. Efisiensi dan akuntabilitas dalam manajemen dan alokasi anggaran dicapai dengan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dan kewirausahaan. Kewirausahaan dimaknai dua hal yaitu pertama setiap penetapan alokasi anggaran harus selalu memperhitungkan manfaat dan biaya. Kedua, setiap pegawai memiliki jiwa sebagai petugas hubungan masyarakat UT yang senantiasa mampu memberikan informasi tentang UT dan produk UT kepada siapa saja yang membutuhkan informasi tersebut. Dalam Renstra UT pada sasaran 14 telah dicanangkan bahwa pada tahun 2015 UT memiliki budaya organisasi berorientasi padan kinerja berkualitas, dan pada tahun 2021 UT telah memiliki budaya organisasi yang inovatif.

Secara garis besar budaya organisasi diarahkan kepada nilai/prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip-prinsip budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas produk, program dan layanan
2. Mengembangkan prinsip-prinsip budaya organisasi yang inovatif

3. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan PTTJJ dan produk akademik yang berkualitas tinggi yang memenuhi standar nasional, regional, dan/atau internasional.

4.2 Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Terbuka

SPI dilingkungan Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dibentuk atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemdikbud, SPI Universitas Terbuka (UT) dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 7522/UN31/KEP/2011. SPI UT membantu Rektor menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka seluruh Indonesia. Mengacu pada Permendiknas No. 47 tahun 2011 tersebut diatas, pengawasan internal meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

4.2.1 Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Satuan Pengawas Intern Universitas Terbuka (SPI-UT)

Guna menopang sistem kerja dan dipenuhinya standar profesi serta amanah piagam SPI, maka disusun Standar Operasi dan Prosedur SPI UT sebagai berikut.

1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

SPI harus membuat perencanaan pengawasan sebelum melaksanakan penugasan yaitu PKPT. Penyusunan PKPT didasarkan atas:

- (1). PKPT tahun sebelumnya setelah revisi,

- (2). Realisasi penugasan tahun sebelumnya,
- (3). Penugasan dan kebijakan Rektor di bidang pengawasan intern.

Dalam menyusun PKPT, SPI harus memperhitungkan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Jenis, sasaran, dan ruang lingkup pengawasan,
- (2). Waktu mulai pelaksanaan pengawasan atau Rencana Mulai Pengawasan (RMP),
- (3). Rencana Penerbitan Laporan (RPL),
- (4). Jumlah dan susunan personil,
- (5). Jangka waktu pengawasan atau Hari Pengawasan (HP),
- (6). Biaya pengawasan.

Dalam menetapkan RMP, SPI perlu mempertimbangkan pelaksanaan pengawasan yang lain (seperti ISO dan dari auditor eksternal) sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan audit. Usulan PKPT yang telah disetujui Rektor menjadi PKPT sebagai dasar SPI dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Prosedur Penyusunan PKPT

- (1). Koordinator Bidang Program menyusun konsep Usulan PKPT untuk tahun berikutnya dan diajukan kepada kepala SPI.
- (2). Kepala SPI membahas konsep Usulan PKPT dengan seluruh bidang (Koordinator Bidang Program, Koordinator Bidang Audit, Koordinator Bidang Evaluasi, dan Bagian Tata Usaha). Konsep Usulan PKPT yang telah selesai dibahas tersebut selanjutnya diajukan oleh Kepala SPI kepada PR (Pembantu Rektor) II.

- (3).PR II membahas konsep Usulan PKPT dengan Kepala SPI, Koordinator Bidang Program, Koordinator Bidang Audit, Koordinator Bidang Evaluasi, dan Bagian TU. Konsep Usulan PKPT yang telah dibahas tersebut dan disetujui oleh PR II menjadi Usulan PKPT.
- (4).Usulan PKPT yang telah disetujui oleh PR II selanjutnya dimintakan persetujuannya kepada Rektor.
- (5).Usulan PKPT yang telah ditandatangani oleh Rektor menjadi PKPT.

2. SOP Pelaksanaan Audit

1). Prosedur Penerbitan Surat Tugas

- a. Berdasarkan PKPT, Kepala Bidang Audit bersama Supervisor membentuk tim audit dan menugaskan Ketua Tim untuk menyiapkan Berkas Penugasan.
- b. Tim (Ketua Tim dan Anggota Tim) menyiapkan Berkas Penugasan yang terdiri dari konsep surat tugas dan anggaran biaya audit (cost sheet). Konsep surat tugas dilampiri form anggaran waktu audit (KM3), Kartu Penugasan (KM4), Program Kerja Audit (KM9).
- c. Supervisor dan Koordinator Bidang Audit mereviu Berkas Penugasan agar bebas dari kesalahan.
- d. Berkas Penugasan yang sudah selesai direviu kemudian diparaf/ditandatangani oleh Supervisor dan Koordinator Bidang Audit, selanjutnya diajukan oleh Koordinator Bidang Audit kepada Koordinator Bidang Program.
- e. Koordinator Bidang Program mengecek kesesuaian Berkas Penugasan dengan PKPT dan mencatat ke dalam buku monitoring penugasan. Koordinator Bidang Program juga memberikan catatan jika ketua tim yang bersangkutan belum menyelesaikan penugasan sebelumnya. Selanjutnya

Koordinator Bidang Program menyampaikan Berkas Penugasan kepada Bagian TU.

- f. Bagian TU melakukan verifikasi atas usulan biaya pengawasan (cost sheet) apakah telah sesuai dengan PKPT dan apakah masih tersedia dananya sesuai dengan catatan sisa anggaran pengawasan. Setelah Bagian TU menandatangani cost sheet, selanjutnya menyampaikan Berkas Penugasan kepada Kepala SPI untuk dimintakan persetujuannya.
- g. Kepala SPI melakukan reviu atas usulan surat tugas dan cost sheet yang diajukan. Jika konsep surat tugas dan cost sheet telah sesuai dan benar, maka Kepala SPI memberikan persetujuannya.
- h. Bagian TU melengkapi konsep surat tugas dengan nomor dan tanggal, serta menggandakan untuk menjadi surat tugas (ST) setelah diparaf oleh Koordinator Bidang Audit dan Kepala SPI dan dimintakan tanda tangan PR II.
- i. Bagian TU menyerahkan ST yang telah ditandatangani PR II kepada tim yang bersangkutan, dan menyampaikan tembusan ST sesuai alamat yang dituju. Selanjutnya mencatat dan mengadministrasikan ST dalam tata persuratan sebagai bahan untuk melakukan monitoring penugasan.
- j. Atas dasar cost sheet yang telah disetujui oleh Kepala SPI, Bagian TU menyiapkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan uang biaya perjalanan dinas untuk diserahkan kepada tim yang bersangkutan.

2). Prosedur Kegiatan Lapangan (Field Work)

- a. Tim audit menyerahkan ST kepada pimpinan satuan kerja yang diaudit dan melakukan pembicaraan pendahuluan dalam rangka pelaksanaan audit di lapangan.
- b. Tim Audit mempelajari kegiatan unit yang diaudit untuk memperoleh pemahaman *core bussines auditee*, peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk menyimpulkan sistem pengendalian internal.
- c. Tim Audit melakukan serangkaian pengujian pengendalian internal untuk mengetahui resiko pengendalian.
- d. Melakukan penelitian dan pengujian terbatas (*sampling*) atas dokumen dan bukti penerimaan dan bukti pendukung pengeluaran (*compliance* dan *substantive*), serta menyusun *tentative audit objective* (TAO).
- e. Melakukan penelitian dan pengujian lanjutan atas TAO.
- f. Melakukan pemeriksaan fisik/hasil kegiatan satuan kerja/unit kerja di lapangan.
- g. Menyusun *finding audit objective* (FAO).
- h. Menyusun dan melengkapi Kertas Kerja Pengawasan (KKP).
- i. Ketua Tim membuat simpulan sementara temuan/hasil audit dan melakukan pembahasan dengan Supervisor dan/atau Koordinator Bidang Audit.
- j. Pembahasan hasil audit dengan pimpinan satuan kerja/unit kerja, dan membuat berita acara pembahasan hasil audit.

3). Prosedur Pelaporan

- a. Berdasarkan hasil audit yang telah disetujui (berita acara pembahasan hasil audit), ketua tim menyusun konsep Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan hasil audit dan pedoman penyusunan laporan hasil audit dan SP-1 (Surat Penegasan pertama tentang ringkasan temuan hasil audit). Konsep LHA harus disertai dengan berita acara kesepakatan melaksanakan tindak lanjut hasil audit, Media Entry Sheet (atas temuan hasil audit), KM8 (Laporan Supervisi Pelaksanaan Audit), dan KM9 yang sudah diisi realisasinya.
- b. Konsep LHA dan SP1 yang telah selesai disusun oleh ketua tim selanjutnya disertai dengan KKA secara berjenjang diserahkan dan direviu oleh Supervisor, Koordinator Bidang Audit dan Kepala SPI. Ketua tim memperbaiki setiap konsep LHA yang telah direviu secara berjenjang.
- c. Konsep LHA dan SP1 setelah selesai direviu supervisor dan diperbaiki oleh ketua tim, selanjutnya diserahkan kepada Koordinator Bidang Audit untuk direviu.
- d. Hasil *review* Koordinator Bidang Audit setelah diperbaiki oleh ketua tim dan dicek oleh supervisor, selanjutnya diserahkan kepada Kepala SPI.
- e. Konsep LHA dan SP1 setelah direviu oleh Kepala SPI dan diperbaiki oleh ketua tim dan dicek kembali oleh supervisor serta oleh Koordinator Bidang Audit, selanjutnya diserahkan kepada Bagian TU untuk diberi nomor & tanggal laporan dan selanjutnya digandakan.
- f. Konsep LHA menjadi LHA setelah ditandatangani oleh Kepala SPI.

3. SOP Pengiriman LHA

Pengiriman LHA ditujukan kepada auditan, PR II, dan Rektor. Prosedur Pengiriman LHA

- a. Bagian TU memasukkan LHA ke dalam sampul yang telah ditulis alamat yang dituju, dan membuat surat pengantar yang sekaligus berfungsi sebagai tanda terima pengiriman LHA.
- b. Surat pengantar pengiriman LHA ditandatangani dan distempel oleh Bagian TU (pihak pengirim).
- c. Pengiriman LHA dapat dilakukan melalui kurir atau melalui perusahaan jasa pengiriman surat.
- d. LHA dinyatakan terkirim setelah pihak penerima LHA menandatangani surat pengantar sebagai pernyataan bahwa LHA telah diterima, bukti terima dikirimkan kembali ke TU.

4. SOP Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Setiap tiga bulan Koordinator Bidang Audit melakukan penelaahan atas rekomendasi yang belum/telah ditindaklanjuti. Atas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh auditee, auditee diberikan surat penghargaan (ucapan terimakasih) dan untuk rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, kepada auditee diberi surat teguran.

Koordinator Bidang Evaluasi menyediakan perangkat database yang berkaitan dengan penyimpanan laporan, daftar temuan dan rekomendasi serta tindaklanjut dari auditee. Prosedur Monitoring Tindak Lanjut :

- (1). Koordinator Bidang Evaluasi mencatat setiap LHA yang terbit ke dalam Daftar Monitoring Tindak Lanjut LHA.

- (2). Jika dalam 1 bulan setelah tanggal LHA belum ada tindak lanjut dari satuan kerja/unit kerja, maka Koordinator Bidang Evaluasi menyiapkan dan menerbitkan surat penegasan (SP2) dan dikirimkan kepada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan.
- (3). Selanjutnya jika dalam 3 bulan setelah tanggal LHA belum ada tindak lanjut dari satuan kerja/unit kerja, maka Koordinator Bidang Evaluasi menyiapkan dan menerbitkan surat penegasan (SP3) dan dikirimkan kepada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan.
- (4). Bagian TU menerima surat/nota tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja/unit kerja, mencatat dalam buku surat masuk dan menyampaikan kepada Kepala SPI. Selanjutnya Kepala SPI mendisposisikan surat tersebut kepada Koordinator Bidang Audit dan Koordinator Bidang Evaluasi.
- (5). Koordinator Bidang Audit menugaskan ketua tim untuk meneliti kecukupan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditan dan menyiapkan konsep surat jawabannya.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan dan kebutuhan penugasan dan tanggung jawab SPI UT ke depan, SOP SPI UT akan terus dikembangkan dari waktu ke waktu demi perbaikan berkelanjutan.

4.3 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2008:169): "Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Dalam hal ini data mengenai sampel penelitian yang digunakan adalah berdasarkan populasi dari internal auditor Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ Universitas Terbuka Bogor. Berikut adalah tabel *descriptive statistic* yang diolah melalui SPSS berdasarkan skor kuesioner :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Skor IA	43	2.01	2.85	4.86	3.9859	.44844
Skor PI	43	1.71	3.21	4.93	4.1856	.38542
Skor GCG	43	1.20	3.57	4.77	4.2042	.31785
Valid N (listwise)	43					

Sumber : Data Olahan Peneliti (2013)

Dari tabel statistik deskriptif di atas terlihat bahwa sampel terdiri dari 43 auditor internal. Kesimpulan dari tabel diatas yaitu, nilai minimum untuk variabel internal audit dari skor jawaban responden adalah 2,85 yang didapat dari responden 8. Sedangkan untuk skor internal audit maksimum adalah 4,86 yang didapat dari reponden 12. *Range* dari minimal dan maksimal untuk variabel internal audit adalah 2,01. Selain itu nilai penyimpangan skor variabel internal audit adalah 0,44844

Untuk variabel pengendalian internal didapat bahwa skor minimum responden adalah 3,21 yang didapat dari responden 19, sedangkan skor maksimum variabel pengendalian internal adalah 4,93 yang didapat dari responden 33. *Range* dari nilai minimum dan maksimum variabel pengendalian internal adalah sebesar 1,71 dan nilai penyimpangan skor variabel pengendalian internal adalah 0,38542.

Dari variabel GCG didapat bahwa skor minimum untuk responden adalah sebesar 3,57 yang didapat dari responden 43 dan skor maksimum responden sebesar 4,77 yang

didapat dari responden 14. Sedangkan *range* antara nilai minimum dan maksimum variabel GCG adalah 1,20, dengan nilai penyimpangan sebesar 0,31785.

Penggambaran sampel dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak tergambar dengan jelas identitas responden (nama, jenis kelamin, umur serta jabatan responden), disebabkan karena tidak semua sampel penelitian mengisi identitas responden tersebut dengan lengkap, sehingga hal ini menjadi salah satu keterbatasan penelitian.

4.3.2 Analisa Hasil Uji Validitas

Pada data sampel penelitian yang disebar di Universitas Terbuka ditemukan adanya data outlier, sehingga terjadi pengurangan jumlah data dari 43 sampel yang ada menjadi 40 sampel penelitian. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Ghozali, 2011;41). Ada empat penyebab timbulnya data outlier : (1) kesalahan dalam meng-entri data, (2) gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer, (3) outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, dan (4) outlier berasal dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal.

Uji pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji validitas, menurut Sunyoto (2011;72) kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-

masing butir pertanyaan dan total skor. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pernyataan yang menjadi indikator setiap variabel penelitian. Penelitian ini terbagi menjadi dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari internal audit dan penerapan pengendalian internal, sedangkan variabel dependen terdiri dari *Good Corporate Governance* (GCG). Variabel internal audit terdiri dari 7 indikator pernyataan, variabel penerapan pengendalian internal terdiri dari 14 indikator pernyataan, dan GCG terdiri dari 26 indikator pernyataan. Dari jumlah 47 pernyataan, dilakukan uji validitas terhadap kuesioner ini (dicantumkan pada lampiran 2).

Dari tampilan output SPSS *nonparametric correlations* (pada lampiran 2), terlihat bahwa korelasi antara butir pernyataan pada variabel internal audit terhadap total skor internal audit menunjukkan hasil yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan kuesioner internal audit adalah valid. Selanjutnya korelasi antara butir pernyataan pada variabel penerapan pengendalian internal terhadap total skor penerapan pengendalian internal juga menunjukkan hasil yang signifikan dan didapat kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan kuesioner pengendalian internal adalah valid. Terakhir, korelasi antara butir pernyataan pada variabel GCG terhadap total skor GCG menunjukkan hasil yang signifikan dan didapat kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan kuesioner GCG adalah valid. Ketiga variabel dinyatakan valid, karena hasil *Pearson Correlation* diketahui bahwa semua pernyataan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel. Diketahui untuk nilai r taraf kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % dapat dicari berdasarkan jumlah responden (N). Oleh karena $N = 40$ dan $\alpha = 0,05$, maka besarnya r tabel adalah 0,312.

4.3.3 Analisa Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Sunyoto (2011;67), butir pertanyaan dikatakan *reliable* atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Dimana nilai cronbach alpha pada butir pertanyaan memiliki nilai $>0,60$. Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang diolah menggunakan bantuan SPSS :

Tabel 4.2

Uji Reliabilitas Penelitian Output SPSS

Variabel Bebas (X_1) Internal Audit

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.646	7

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2013)

Dari hasil uji reliabilitas variabel bebas (X_1) didapat hasil *cronbach alpha* $> 0,60$, yaitu sebesar 0,646. Hal ini mengindikasikan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengungkapkan variabel internal audit bersifat reliabel, yang menyatakan bahwa pernyataan yang disajikan di dalam penelitian untuk mengukur internal audit dapat menghasilkan sekitar 64,6 % jawaban yang sama sengan penelitian ini, apabila pernyataan tersebut diujikan ulang.

Tabel 4.3

Uji Reliabilitas Output SPSS

Variabel bebas (x_2) Pengendalian Internal

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.814	14

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2013)

Dari hasil uji reliabilitas variabel bebas (x_2) didapat hasil *cronbach alpha* > 0,60, yaitu sebesar 0,814. Hasil uji ini menyatakan bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengungkapkan variabel penerapan pengendalian internal bersifat reliabel dan dapat dikonfirmasi bahwa pernyataan yang disajikan didalam penelitian untuk mengukur pengendalian internal dapat menghasilkan sekitar 81,4% jawaban yang sama dengan penelitian ini, jika pernyataan tersebut diulang.

Tabel 4.4

Uji Reliabilitas Penelitian Output SPSS

Variabel terikat (Y) *Good Corporate Governance (GCG)*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.848	26

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2013)

Dari hasil uji reliabilitas variabel terikat (Y) didapat hasil *cronbach alpha* > 0,60, yaitu sebesar 0,846. Hasil uji ini menyatakan pernyataan yang digunakan untuk mengungkapkan variabel GCG bersifat reliabel. Dari hasil ini juga didapat analisa bahwa pernyataan yang disajikan di dalam penelitian untuk mengukur GCG dapat menghasilkan sekitar 84,8 % jawaban yang sama dengan penelitian ini apabila pernyataan tersebut diuji ulang. Berikut peneliti merangkum penjabaran atas uji reliabilitas menjadi sebuah tabel :

Tabel 4.5

Hasil Uji Reliabilitas Penelitian

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Internal Audit	0,646 > 0,60	Reliabel
2	Pengendalian Internal	0,814 > 0,60	Reliabel
3	<i>Good Corporate Governance</i>	0,848 > 0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2013)

Dari tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item pernyataan di dalam kuesioner yang disebarakan terhadap 40 responden bersifat *reliable*. Hal ini menjadikan dasar bahwa H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak, sehingga setiap pernyataan di dalam kuesioner dinyatakan bersifat reliabel dan variabel didalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur.

4.3.4 Analisa Uji Asumsi Klasik

4.3.4.1 Analisa Uji Asumsi Klasik Normalitas

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011;84). Pada uji ini data dikatakan normal apabila nilai signifikansi > 0,05, dan apabila nilai < 0,05 maka data dikatakan tidak normal dan harus dilakukan pemilahan outlier. Berikut adalah output dari uji normalitas yang diolah melalui SPSS :

Tabel 4.6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
	Mean	.0E-7
Normal Parameters		.27770896
Std.Deviation		
Most Extreme		.074
Absolute		.074
Positive		
Differences		-.058
Negative		.467
Kolmogrov-Smirnov Z		.981
Asymp. Sig. (2-tailed)		

a. Test distribution is Normal

Sumber : Data Primer yang diolah peneliti (2013)

Dari penjabaran tabel di atas, ditemukan bahwa nilai signifikansi $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak, yang bermakna bahwa data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) didalam persamaan regresi terdistribusi secara normal

4.3.4.2 Analisa Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut Sunyoto (2011;79), uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas, di mana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r \leq 0,60$) (Sunyoto, 2011;79). Berikut adalah hasil perhitungan uji multikolinieritas, yang dihitung menggunakan bantuan SPSS :

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficient Correlation

Model		PI	IA
1	Correlation	PI	1.000
	S	IA	-.219
		PI	1.000
		IA	-.219
Covarianc	PI	.014	-.003
	Es	IA	-.003

a. Dependent Variabel :GCG

Sumber : Data primer yang di olah peneliti (2013)

Tabel 4.8

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.652	.573		4.629	.000	1.491	3.813		
	IA	.099	.102	.149	.974	.336	-.107	.305	.952	1.051
	PI	.281	.119	.361	2.362	.024	.040	.523	.952	1.051

a. Dependent Variable: GCG

Sumber : Data primer yang di olah peneliti (2013)

Dari output di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan besaran koefisien korelasi antar variabel bebas (internal audit dan penerapan pengendalian internal), terlihat koefisien korelasi antar variabel bebas sebesar -0,219 jauh di bawah 0,60. Disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Dengan menggunakan besaran tolerance (a) dan *variance inflaction factor* (VIF) jika menggunakan alpha atau tolerance = 10 % atau 0,10 maka VIF = 10. Dari output besar VIF hitung (VIF financial = 1,051 dan VIF nonfinansial =1,051) < VIF =10, dapat disimpulkan bahwa antarvariabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.4.3 Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Menurut Sunyoto (2011;82), dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan melalui uji Komolgorov-Smirnov dengan membandingkan nilai signifikansi t dan F. Berikut adalah output uji heteroskedastisitas dengan menggunakan signifikansi F dan signifikansi t :

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas Signifikansi F
ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean	F	Sig.
Regression 1	.039	2	.019	.735	.488
Residual Total	.978	37	.026		
	1.016	39			

a. Dependent Variable: ABS_RES

b. Predictors: (Constant), PI,IA

Sumber : Data Primer yang diolah peneliti (2013)

Tabel 4.10

Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardize d Coefficients	t	Sig
	B Error	Std.	Beta		
(Constant)	.157	.327		.481	.634
IA	-.053	.058	-.151	-.917	.365
PI	.066	.068	.161	.976	.336

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data Primer yang diolah peneliti (2013)

Dari hasil analisis signifikansi F dan t di atas, didapat bahwa nilai signifikansi F adalah sebesar 0,486. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $F > 0,05$. Sedangkan untuk signifikansi t, variabel internal audit didapat nilainya $> 0,05$ yaitu 0,365 dan untuk variabel pengendalian internal juga terlihat nilainya $> 0,05$, yaitu 0,336. Kesimpulan yang didapat dari uji ini adalah H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak, karena nilai signifikansi t dan F yang dihasilkan $> 0,05$. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi, yang menandakan residual observasi memiliki nilai yang sama atau bersifat homoskedastisitas.

4.3.5 Analisa Regresi Linier Berganda

Menurut sunyoto (2011;1), analisis regresi merupakan suatu analisa yang umumnya digunakan di dalam penelitian untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). analisis regresi linier berganda pada penelitian ini diukur menggunakan bantuan program SPSS versi 20. Berikut adalah besaran koefisiensi yang digunakan di dalam model, hasilnya ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.11
Koefisiensi Model Regresi

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.652	.573		4.629	.000	1.491	3.813		
	IA	.099	.102	.149	.974	.336	-.107	.305	.952	1.051
	PI	.281	.119	.361	2.362	.024	.040	.523	.952	1.051

a. Dependent Variable: GCG

Sumber : Datta primer yang diolah peneliti (2013)

Dari hasil regresi berganda yang didapat dari olah menggunakan SPSS di atas, maka besaran koefisiensi pada model penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = 2.652 + 0,099 X_1 + 0,281 X_2$$

Dari koefisiensi yang di dapat di atas, maka berikut adalah analisis peneliti :

1. Jika variabel X_1 dan X_2 bernilai 0, maka rata-rata variabel di luar model tersebut akan meningkatkan GCG sebesar 2,652 satuan.
2. Variabel internal audit (X_1), berpengaruh positif terhadap GCG di dalam model. Jika (X_1) meningkat satu (1) satuan, maka GCG akan meningkat sebesar 0,09. Jika X_1 turun satu (1) satuan, maka GCG akan turun sebesar 0,09
3. Variabel pengendalian internal, berpengaruh positif terhadap GCG didalam model. Jika X_2 meningkat satu (1) satuan, maka GCG akan meningkat sebesar 0,281. Jika X_2 turun satu (1) satuan, maka GCG akan turun sebesar 0,281 satuan.

4.4 Analisis Uji Hipotesis

4.4.1 Pengujian Parsial (Uji t)

Uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan *two tailed-test*, yaitu uji yang memiliki dua daerah penolakan baik di daerah *lower* maupun *upper tails* untuk distribusi sampling, Anderson *et al* (2002;339). Analisis dari uji t ini adalah ingin melihat bagaimana pengaruh (baik positif maupun negatif) antara variabel bebas terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah analisa uji parsial (t) variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang dituangkan dalam bentuk output SPSS.

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (t) Variabel bebas (X_1 dan X_2)

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.652	.573		4.629	.000	1.491	3.813		
	IA	.099	.102	.149	.974	.336	-.107	.305	.952	1.051
	PI	.281	.119	.361	2.362	.024	.040	.523	.952	1.051

a. Dependent Variable: GCG

Sumber : Data Primer yang diolah peneliti (2013)

Dengan menggunakan bantuan program SPSS, berikut penjabaran pengujian parsial :

1. Pengujian parsial koefisiensi regresi internal audit (b_1) :

- Menggunakan t hitung (nilai t yang berasal dari signifikansi), untuk variabel internal audit (X_1), didapat nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,336. Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak.

Penerimaan H_0 ini menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan internal audit terhadap GCG. ($H_a : \beta_1 = 0$)

- b. Menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t tabel, diperlukan perhitungan *degree of freedom* (df) dengan rumus $= n - P - 1$, maka didapat $df = 40 - 2 - 1 = 37$. Dengan nilai df sebesar 37, didapat nilai t tabel sebesar 1,687 (mendekati nilai df 37). Hal ini menjelaskan bahwa, variabel internal auditor dengan nilai t hitung sebesar 0,974 lebih kecil dari t tabel (t hitung $0,974 < t$ tabel 1,687). Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak, yang menandakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan internal audit terhadap GCG ($H_a : \beta_1 \neq 0$).

Kedua perhitungan diatas, memberikan kesimpulan bahwa H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak, yang menandakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan audit internal terhadap GCG. Kemungkinan hal ini terjadi, dikarenakan internal audit yang berjalan di universitas terbuka saat ini (SPI) baru saja menginjak tahun ke- tiga semenjak SPI di bentuk atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 47 tahun 2011, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pengujian parsial koefisiensi regresi penerapan pengendalian internal (β_2)

- a. Menggunakan t hitung (nilai t berasal dari signifikansi), untuk variabel penerapan pengendalian internal (X_2), didapat nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,024. Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak. Penolakan H_0 ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan independensi internal auditor terhadap GCG. ($H_a : \beta_2 \neq 0$).

b. Menggunakan perbandingan antara t hitung dengan t tabel, diperlukan perhitungan *degree of freedom* (df) dengan rumus $n-P-1$, maka didapat $df = 40-2-1 = 37$. Dengan nilai df 37, didapat nilai t tabel sebesar 1,687. Untuk variabel penerapan pengendalian internal, didapat nilai t hitung sebesar 2,362, dimana dapat disimpulkan nilai t hitung $2,362 > t$ tabel 1,687. Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak, yang menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan pengendalian internal terhadap GCG ($H_a : \mu_2 \neq 0$).

Kedua perhitungan diatas, memberikan kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak, yang menandakan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan pengendalian internal terhadap GCG. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, pada BAB II bahwa penerapan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap perwujudan GCG.

4.4.2 Pengujian Simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian simultan untuk menguji pengaruh internal audit (X_1) dan penerapan pengendalian internal (X_2) terhadap GCG. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengujian ini menggunakan distribusi F, dengan membandingkan F hitung (F rasio) dengan F tabel, dan pengujian ini dilakukan hanya pada area *upper tail* (*one-tailed*). Berikut adalah output SPSS untuk uji F :

Tabel 4.13

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.644	2	.322	3.959	.028
Residual	3.008	37	.081		
Total	3.651	39			

a. Dependent Variable: SKOR GCG

b. Predictors: (Constant), SKOR_PI, SKORI IA

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2013)

Berdasarkan *output* perhitungan uji F di atas, maka dapat dijabarkan operasionalisasi uji simultan sebagai berikut :

1. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Untuk mendapatkan nilai F tabel, maka perlu dihitung nilai dari degree of *freedom* baik untuk df pembilang (numerator) yang didapat dari banyaknya variabel bebas, didalam penelitian ini df numerator adalah 2, maupun untuk df penyebut (denominator) dengan rumus $df = n - P - 1$, yaitu sebesar 37. Dengan α sebesar 0,05, maka nilai F tabel didapat sebesar 3,252. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, yaitu sebesar 3,959 ($> 3,252$). Dengan menggunakan perbandingan ini, maka H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap GCG ($H_0 : b_1, b_2 = 0$).

2. Menggunakan *p-value*

Nilai dari *p-value* pada uji F dilihat dari signifikansi yang telah didapat pada tabel uji F diatas. Pada tabel diatas, terlihat nilai signifikansi F adalah 0,028 $< 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak

sehingga didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh simultan internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap GCG.

Dengan menggunakan kedua perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap GCG.

4.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, koefisien determinasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model penelitian menerangkan variasi yang dimiliki oleh variabel terikat (*dependent*), Ghozali (2009 ; 87). Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi yang diolah dengan program SPSS :

Tabel 4.14

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.420 ^a	.176	.132	.28512

a. Predictors: (Constant), SKOR_V2, SKOR_V1

b. Dependent Variable: SKOR_Y

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2013)

Hasil *output* di atas, menunjukkan bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,132, atau sebesar 13,2 %. Hal ini berarti bahwa 13,2 % *Good Corporate Governance* dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu internal audit dan penerapan pengendalian internal. Sedangkan sisanya 86,8% *Good Corporate Governance* dipengaruhi oleh faktor lain yang berada diluar penelitian. Hal ini menjadi keterbatasan penelitian untuk menggali variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi *Good Corporate Governance*. Menurut Sunyoto (2011; 97), secara umum koefisien determinasi untuk data silang

(*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan.

4.5 Analisis Penulis

4.5.1 Pengaruh Internal Audit Terhadap *Good Corporate Governance*

Dari hasil uji T yang telah dilakukan, didapat nilai signifikansi variabel internal audit adalah sebesar 0,336. Maka dari hasil pengolahan tersebut, mendapati bahwa H_0 tidak dapat ditolak dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan internal audit terhadap GCG.

Secara teori dan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Raharja (diakses Oktober 2012), Windrya (2012) dan lain-lain, seharusnya memang audit internal adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan GCG di suatu organisasi. Namun ketika peneliti melakukan penelitian di BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ Bogor yang notabennya merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan pada objek penelitian yang jauh berbeda dari teori maupun penelitian terdahulu lainnya. Peneliti menemukan hasil bahwa internal audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap GCG. Hal ini didukung dengan penemuan peneliti mengenai sejarah berdirinya SPI dikalangan BLU, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada gambaran objek penelitian, bahwa pemerintah sendiri baru membentuk peraturan tentang SPI pada tahun 2011 No.47 dan SPI Universitas Terbuka sendiri juga baru dibentuk berdasarkan SK Rektor No. 7522/UN31/KEP/2011. Keberadaan SPI yang baru berjalan selama tiga tahun tentunya belum dapat dirasakan hasilnya secara optimal, hal ini dibuktikan dengan beberapa penemuan yang ditemukan oleh peneliti. Berikut adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti .

Berdasarkan analisis peneliti, menemukan bahwa terdapat pelanggaran dalam struktur organisasi SPI pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor. Berikut adalah 43 jumlah auditor pada SPI Universitas Terbuka :

Tabel 4.15

Anggota SPI

No	Keterangan	Jumlah
1	Dosen	32
2	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Sekretariat Pembantu Rektor	4
II		
3	Auditor Tetap	7
Total Populasi		43

Sumber : Data primer olahan peneliti (2013)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar auditor pada BLU Universitas Terbuka masih merangkap pekerjaannya yaitu, pekerjaan utama mereka sebagai dosen dan staf administrasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan, usia SPI yang masih relatif baru menyebabkan SPI masih mengalami kekurangan tenaga auditor untuk dapat dijadikan auditor tetap.

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS (Pegawai Negri Sipil). Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, pertama adalah **Jabatan Struktural** yaitu, jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur

Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Kedua adalah **Jabatan Fungsional**, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 29 tahun 1997 terdapat larangan mengenai PNS yang menduduki jabatan rangkap, namun PP terbaru pemerintah no. 37 tahun 2009 mendapatkan peraturan baru mengenai PNS, khususnya PNS dosen yaitu, PNS dosen yang sudah bertugas sebagai dosen paling sedikit 8 tahun dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar Perguruan Tinggi, dibebaskan sementara dari jabatan apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen dan semua tunjangan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen diberhentikan sementara.

Dalam hal ini, dapat menunjukkan bahwa auditor dan dosen pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor menempati jabatan fungsional, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, dosen dan staf ahli pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor juga mendapat larangan merangkap pekerjaan atau jika tetap melakukan rangkap pekerjaan, maka harus meninggalkan jabatan fungsionalnya. Sebagian besar auditor pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor adalah dosen, namun peneliti menemukan bahwa dosen yang merangkap sebagai auditor tetap memegang jabatannya, yaitu jabatan fungsional. Hal tersebut tentunya melanggar peraturan pemerintah.

Dampak dari rangkap pekerjaan ini, bukan hanya terhadap dilanggarnya peraturan pemerintah, namun berdasarkan sumber peneliti yang bekerja sebagai auditor pada BLU ini, menemukan bahwa auditor yang merangkap pekerjaannya sebagai dosen atau staf administrasi sering kali terlambat dalam melaporkan hasil audit dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas internal audit pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor. Berdasarkan sumber pada BLU ini juga dinyatakan bahwa, sampai saat ini BLU masih kekurangan tenaga auditor, namun diyakini seiring dengan berjalannya waktu BLU ini dapat mengoptimalkan jumlah auditor, khususnya auditor tetap.

Meskipun begitu, pelanggaran yang telah dilakukan tentunya mempengaruhi kinerja auditor pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor, dikarenakan keluarnya suatu peraturan pemerintah tentunya telah melewati segala pertimbangan yang jika tidak dipatuhi dapat menuai risiko yang tidak diinginkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga kerja auditor pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor belum optimal.

Selain hal di atas, peneliti juga menganalisa dari segi indikator tiap pertanyaan kuesioner yang di sebarakan pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor. Berikut adalah hasil skor rerata kuesioner yang ditampilkan pada tabel 4.16 :

Tabel 4.16

Skor Rerata Indikator Variabel Internal Audit

No	Pernyataan	Internal Audit (7 indikator)
1	Peranan dan sasaran SPI berfokus pada area dari dampak berbagai risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis instansi	3.775
2	SPI bertanggung jawab kepada pimpinan utama BLU	4.025
3	SPI memiliki akses yang tidak terbatas (4-12 kali setahun) terhadap para anggota pimpinan dan berkomunikasi informal dengan pimpinan, serta menjadi bagian dalam rapat-rapat pimpinan	3.925
4	Independensi SPI diakui pimpinan sebagai kunci bagi efektivitas SPI	4.250
5	SPI juga terlibat dalam revisi penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)	3.850
6	Laporan SPI juga mencakup analisis biaya manfaat dari rekomendasi, <i>assessment</i> terhadap semua aspek lingkungan pengendalian dan focus audit kedepan.	4.000
7	Hasil <i>assessment</i> risiko oleh SPI didiskusikan dengan manajemen dan diperbandingkan dengan hasil <i>assessment</i> risiko yang dibuat.	4.175

Sumber : Data Olahan Peneliti (2013)

Dari tabel diatas, menjelaskan bahwa indikator 1, 3, dan 5 mendapati nilai rendah diantara 7 indikator yang diberikan. Pertama, indikator 1 yang memberikan pernyataan bahwa “peranan dan sasaran SPI berfokus pada area dari dampak berbagai risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis instansi”, dianggap belum maksimal sejalan dengan praktik yang berjalan di Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor. Hal itu dibuktikan dengan rendah nya nilai rerata skor yaitu sebesar 3,775. Jika melihat kepada teori yang ada (telah dijelaskan pada BAB II) yaitu, dikemukakan oleh Sawyers

(2006,10) dan IIA (*Institut of Internal Auditor*) , bahwa ruang lingkup audit internal diantaranya adalah dapat mengidentifikasi dan meminimalisasi risiko yang dihadapi dan peran internal auditor diantaranya adalah menilai, menganalisis risiko serta menindaklanjuti sistem pengendalian perusahaan atau organisasi. Kedua teori ini berlawanan dengan hasil nilai yang didapat dari indikator 1, dimana pada BLU ini dalam melaksanakan internal audit, SPI belum fokus pada area dari dampak berbagai risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis instansi. Hal ini tentunya juga berdampak pada terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG), dimana GCG merupakan salah satu sasaran strategis pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor.

Kedua, indikator 3 yang memberikan pernyataan “SPI memiliki akses yang tidak terbatas (4-12 kali setahun) terhadap para anggota pimpinan dan berkomunikasi informal dengan pimpinan, serta menjadi bagian dalam rapat-rapat pimpinan”. Nilai rendah yang didapat dari indikator ini yaitu sebesar, 3,925. Nilai ini membuktikan bahwa pernyataan pada indikator 3 belum sesuai dengan praktik yang berlangsung di Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai internal audit yang efektif menurut Sawyers (2006;52), adalah Penyediaan waktu yang cukup dari *top management* untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh departemen internal audit dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan. Melihat teori ini maka terlihat bahwa praktik yang terjadi di Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor yaitu, akses yang tak tidak terbatas terhadap anggota pimpinan dan pimpinan mendapatkan nilai yang rendah. Hal ini berlawanan dengan teori yang Sawyers kemukakan.

Rendahnya akses SPI yang terbatas kepada pimpinan berdampak pada terwujudnya GCG pada BLU ini, dikarenakan hal ini berhubungan dengan salah satu prinsip GCG yaitu, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, sehingga pada saat akses itu menjadi terbatas maka, dapat dikatakan pertanggungjawaban organ pada BLU belum dapat terlaksana secara efektif.

Ketiga, indikator 5 memuat pernyataan “SPI juga terlibat dalam revisi penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)”. Rendahnya nilai yang diterima pada indikator ini yaitu, 3,850 mengakibatkan salah satu prinsip GCG yaitu, Transparansi tidak terlaksana dengan baik. Pada saat ini keterlibatan SPI Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor dalam RKAP masih belum optimal, kondisi tersebut mengakibatkan pada tahun 2012 lalu SPI ditunjuk sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan RKAP. Untuk menunjukkan kinerja SPI sebagai fasilitator RKAP tentu belum dapat dirasakan secara maksimal manfaatnya, karena SPI belum genap satu periode menjabat sebagai fasilitator, sehingga masih membutuhkan proses untuk dapat melihat hasil keterlibatan SPI terhadap RKAP. SPI memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang relevan berupa, hasil internal audit pada saat revisi RKAP dilakukan, namun jika SPI tidak dilibatkan maka, transparansi informasi yang dimiliki SPI untuk menjadi pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan pada saat RKAP dilaksanakan tidak akan terwujud. Hal tersebut tentunya mempengaruhi GCG pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor.

Dari penjabaran di atas, tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa SPI yang relatif baru belum dapat menghasilkan kinerja audit internal yang optimal, dikarenakan tenaga auditor dan sasaran internal audit yang belum sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Akibatnya, kinerja internal audit yang belum optimal tersebut, belum dapat mempengaruhi terwujudnya *Good Corporate Governance* secara parsial.

4.5.2 Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap *Good Corporate Governance*

Berdasarkan uji statistic T diatas, didapat nilai signifikansi variabel penerapan pengendalian internal adalah sebesar 0,024. Maka memenuhi kriteria pengujian bahwa H_0 ditolak dan H_a tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan pengendalian internal terhadap GCG. Berikut adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti :

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa berdasarkan nilai dari setiap indikator variabel penerapan pengendalian internal yang disebarkan melalui kuesioner pada BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor terdapat kelemahan dari nilai terendah yang diterima melalui salah satu pernyataan indikator. Berikut adalah hasil skor rerata kuesioner yang ditampilkan pada tabel 4.17 :

Tabel 4.17

Skor Rerata Indikator Variabel Penerapan Pengendalian Internal

No	pernyataan	Penerapan Pengendalian Internal (14 Indikator)
1	BLU memiliki petunjuk pelaksanaan mengenai tata tertib dan disiplin yang dikomunikasikan kepada pegawai	4.250
2	BLU menerapkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika	4.050
3	Penerimaan calon pegawai didasarkan atas keahlian, pendidikan, kepribadian, dan pengalaman kerja	4.350

Sumber : Data Olahan Peneliti (2013)

4	Dilakukannya tes untuk menilai kemampuan calon pegawai	3.375
5	Instansi memiliki peraturan yang mengatur tentang kewajiban pegawai, hak pegawai, dan larangan bagi pegawai yang dinyatakan secara tertulis	4.350
6	Peraturan kerja telah diterapkan secara konsisten pada semua pegawai	4.075
7	Manajemen menyadari pentingnya pengendalian internal	4.225
8	Instansi memiliki struktur organisasi	4.425
9	Dalam struktur organisasi menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi	4.225
10	Pemisahan fungsi yang ada telah memadai	3.925
11	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mendukung pencapaian tujuan BLU	4.175
12	Pimpinan BLU dapat memastikan bahwa tujuan BLU dapat dipahami oleh pegawai	4.050
13	Terdapat suatu bagian khusus yang berwenang dan bertanggung jawab atas masalah kepegawaian	4.325
14	Apakah manajemen menetapkan risiko sebagai bagian dari pengendalian intern	4.025

Sumber : Data Olahan Peneliti (2013)

Dari tabel diatas, indikator 4 yang memuat pernyataan “dilakukannya tes untuk menilai kemampuan calon pegawai”, mendapati nilai terendah. Meskipun penerimaan calon pegawai dilakukan melalui jalur tes PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan oleh Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional), namun dibutuhkan peningkatan kualitas tes uji masuk penerimaan calon pegawai. Disamping itu semua, indikator yang memuat pernyataan lainnya diyakini dapat menutupi kelemahan pada indikator 4, karena

nilai indikator lainnya telah mendapatkan rerata skor lebih dari 4 (empat). Sehingga variabel ini, yaitu penerapan pengendalian internal dapat dikatakan berpengaruh secara parsial dengan *Good Corporate Governance*.

Selain indikator 4, indikator 10 yang memuat pernyataan “pemisahan fungsi yang ada telah memadai”, juga mendapatkan nilai yang rendah, yaitu sebesar 3,925. Hal ini disebabkan praktik pemisahan fungsi yang telah berjalan di Universitas Terbuka dan UPBJJ-Bogor belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya yaitu, masih ditemukannya tugas rangkap yang dilakukan oleh jajarannya dosen dan staf administrasi. Hal tersebut tentunya telah melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Rendahnya nilai yang diterima pada indikator tentunya mempengaruhi terwujudnya GCG. Salah satu prinsip pada GCG yaitu, akuntabilitas yang berarti kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Beberapa indikator pada variabel penerapan pengendalian internal dipercaya telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pengendalian internal pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor telah berjalan dengan baik. Beberapa indikator tersebut antara lain adalah indikator nomor delapan dan tiga yang memuat pernyataan “ Instansi memiliki struktur organisasi yang baik” dan “Penerimaan calon pegawai didasarkan atas keahlian, pendidikan, kepribadian, dan pengalaman kerja”, indikator ini mendapatkan skor rerata tertinggi pada kuesioner ini. Kedua indikator ini mendukung terwujudnya GCG dikarenakan sesuai dengan prinsip GCG yaitu, akuntabilitas. Akuntabilitas dalam prinsip GCG adalah kejelasan

fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Dari penjabaran analisa peneliti diatas, didapat bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan pengendalian internal terhadap GCG. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Windrya (2012), Sari dan Raharja (diakses Oktober 2012).

4.5.3 Pengaruh Internal Audit dan Penerapan Pengendalian Internal Secara Bersama-sama Terhadap Good Corporate Governance Universitas Terbuka Pusat dan Universitas Terbuka UPBJJ-Bogor.

Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat pengaruh internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap GCG pada objek penelitian secara simultan. Pengolahan data yang dilakukan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa, semakin tinggi internal audit dan penerapan pengendalian internal yang dilakukan maka akan meningkatkan praktik GCG di lingkup BLU. Dengan diterapkannya internal audit dan penerapan pengendalian internal dengan baik, maka tentunya hasil kualitas yang diberikan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan operasi manajemen semakin baik.

Dalam hal ini hasil dari audit internal dan penerapan pengendalian internal yang dilakukan pada BLU Universitas Terbuka pusat dan UPBJJ-Bogor menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan operasi manajemen. Hasil pelaksanaan ini menjadi dasar bagaimana prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik, hal ini juga dibuktikan dengan skor rerata untuk indikator GCG seluruhnya memperoleh nilai lebih dari 4 (empat). Pengaruh audit internal dan penerapan pengendalian internal terhadap

pelaksanaan GCG sangatlah besar, karena telah diketahui bahwa peran internal audit dan penerapan pengendalian internal adalah untuk menetapkan tingkat kesesuaian pelaksanaan instansi dengan peraturan yang ada dan juga prinsip-prinsip dari GCG.

Dari analisa diatas mengenai pengaruh internal audit dan penerapan pengendalian internal secara simultan teradap GCG menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dengan ditegakkannya pelaksanaan internal audit diiringi dengan penerapan pengendalian internal, akan meningkatkan prinsip-prinsip GCG (TARIF). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Windrya (2012), Sari dan Raharja (diakses Oktober 2012).

4.6 Implikasi Manajerial

Pada penelitian ini faktor yang dominan mempengaruhi terwujudnya *Good Corporate Governance* pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ Universitas Terbuka Bogor adalah penerapan pengendalian internal. Hal ini menjadi rekomendasi yang baik bagi Universitas Terbuka Pusat maupun UPBJJ-Bogor. BLU ini dapat meningkatkan kualitas penerapan pengendalian internal dengan terus menjaga keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada dan efektivitas, juga efisiensi operasi. Jika ketiga hal tersebut terus diperhatikan maka bukan hanya akan terjadi peningkatan di dalam penerapan pengendalian internalnya, namun juga akan meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* BLU. Prinsip-prinsip di dalam GCG yang di biasa disebut dengan TARIF, memuat tentang ketiga hal tadi. Seperti keandalan informasi keuangan, dapat meningkatkan transparansi. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada, dapat meningkatkan pertanggungjawaban, kewajaran, dan kemandirian. Efektivitas dan efisiensi operasi, dapat meningkatkan akuntabilitas.

Selain hal tersebut, BLU juga harus dapat memperhatikan penyelenggaraan penerimaan calon pegawai baru. Dikarenakan, dari hasil uji yang telah dilakukan ditemukan bahwa nilai untuk indikator berupa tes calon pegawai baru mengalami penurunan dibandingkan indikator lainnya. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor untuk dapat meningkatkan kualitas tes pada penerimaan calon pegawai dan juga memberikan pelatihan yang kompeten untuk para pegawai, baik pegawai akademik maupun non akademik, karena pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor, sehingga semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki, maka akan meningkatkan kinerja operasi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap terwujudnya GCG.

Terakhir, BLU juga seharusnya memperhatikan kejelasan pemisahan fungsi pada setiap pegawainya, baik pegawai akademik maupun non akademik. Hal ini dikarenakan masih terdapat pelanggaran yang terjadi, yaitu rangkap pekerjaan yang dilakukan oleh dosen dan staf administrasi. Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor sebaiknya dapat menaati peraturan pemerintah dengan menyerap calon tenaga auditor yang kompeten.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi GCG pada penelitian ini adalah internal audit yang menjadi variabel kurang dominan terhadap GCG, karena berdasarkan uji yang dilakukan menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan penerapan pengendalian internal. Menurut peneliti, hal ini disebabkan oleh faktor SPI yang relatif masih baru dan juga tenaga kerja auditor sebanyak 43 yang belum dapat dioptimalkan kinerjanya. Dikarenakan sebagian auditor nya masih menjalankan tugas ganda, yaitu terdiri dari beberapa dosen, bagian perencanaan dan keuangan, serta sekretariat

Pembantu Rektor II. Sedangkan untuk auditor tetap, baru berjumlah 7 orang. Selain melanggar peraturan yang berlaku, hal ini tentunya juga sangat berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh tenaga auditor yang menjalankan tugas ganda, dimana pada analisis sebelumnya ditemukan adanya keterlambatan pelaporan audit internal bagi mereka yang memiliki pekerjaan rangkap. Dalam hal ini seharusnya Universitas Terbuka dan UPBJJ-Bogor dapat meningkatkan kualitas tenaga auditor dengan cara mencari calon auditor tetap yang kompeten, yang sebelumnya dapat diberikan pelatihan-pelatihan khusus sebagai auditor.

Selain hal di atas, peneliti juga menemukan bahwa, pada beberapa indikator dari kuesioner yang disebarkan mendapatkan nilai rendah dibawah 4 (empat). Indikator tersebut antara lain adalah indikator 1, 3, dan 5. Indikator 1 yang berisikan pernyataan “Peranan dan sasaran SPI berfokus pada area dari dampak berbagai risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis instansi”, SPI seharusnya lebih memfokuskan kepada area risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis, karena hal tersebut adalah salah satu dari ruang lingkup dan peran internal audit secara teori. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya pihak SPI dapat lebih memperhatikan peran, ruang lingkup, serta sasaran-sasaran internal audit, sehingga kualitas internal audit dapat terus meningkat.

Indikator 3, dengan pernyataan “SPI memiliki akses yang tidak terbatas (4-12 kali setahun) terhadap para anggota pimpinan dan berkomunikasi informal dengan pimpinan, serta menjadi bagian dalam rapat-rapat pimpinan”. Rendahnya nilai pada indikator ini, seharusnya menjadikan SPI untuk dapat mensosialisasikannya kepada pihak pimpinan, agar dapat memiliki akses yang tidak terbatas dalam rangka meningkatkan internal audit pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor.

Pernyataan ini menjadi sangat penting, karena pada saat SPI dapat menjadi bagian dalam rapat-rapat pimpinan maka, dengan kata lain hasil internal audit dapat menjadi informasi yang material bagi pimpinan dan hal tersebut tentunya akan meningkatkan GCG pada BLU ini.

Indikator 5 memuat pernyataan “SPI juga terlibat dalam revisi penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP)”. Rendahnya nilai yang diterima pada indikator ini mengakibatkan salah satu prinsip GCG yaitu, Transparansi tidak terlaksana dengan baik. SPI memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang relevan untuk diberikan pada saat revisi RKAP dilakukan, namun jika SPI tidak dilibatkan maka, transparansi informasi dalam hal pengambilan keputusan pada saat RKAP dilaksanakan tidak akan terwujud. Berdasarkan hal tersebut maka, SPI seharusnya dapat ikut terlibat dalam revisi penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP). Hal ini didukung dengan ditunjuknya SPI sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan RKAP pada tahun 2012. Hal ini dilakukan agar peran SPI tidak hanya sebagai pengawas pada BLU, namun SPI dapat lebih meningkatkan perannya untuk menjadi konsultasi pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor.

Seiring dengan berjalannya waktu, diyakini bahwa internal audit akan meningkat mutu dan kualitasnya secara optimal, dengan cara meningkatkan kualitas SPI yang telah berjalan. Dan dengan dibuktikannya hasil pengujian yang secara simultan audit internal dan penerapan pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap GCG, telah membuktikan keduanya merupakan variabel yang mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance (GCG)* pada BLU Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya menjawab perumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Secara parsial internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*, hal ini disebabkan karena usia SPI (Satuan Pengawas Internal) pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor yang masih relatif baru.
2. Secara parsial penerapan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*, hal ini disebabkan Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor telah melaksanakan indikator penerapan pengendalian internal secara baik.
3. Secara simultan, internal audit dan penerapan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance* .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran untuk penelitian ini dijabarkan peneliti sebagai berikut :

1. Saran untuk objek penelitian (Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor) :
 - a. Berdasarkan hasil penelitian di atas, usia SPI yang masih relatif baru sebaiknya dapat meningkatkan internal audit dengan tidak melanggar peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu dengan mencari

tenaga auditor tetap dan tidak lagi memberikan perintah kepada pegawai lain untuk merangkap pekerjaan. Hal ini dilakukan agar terwujudnya prinsip-prinsip GCG.

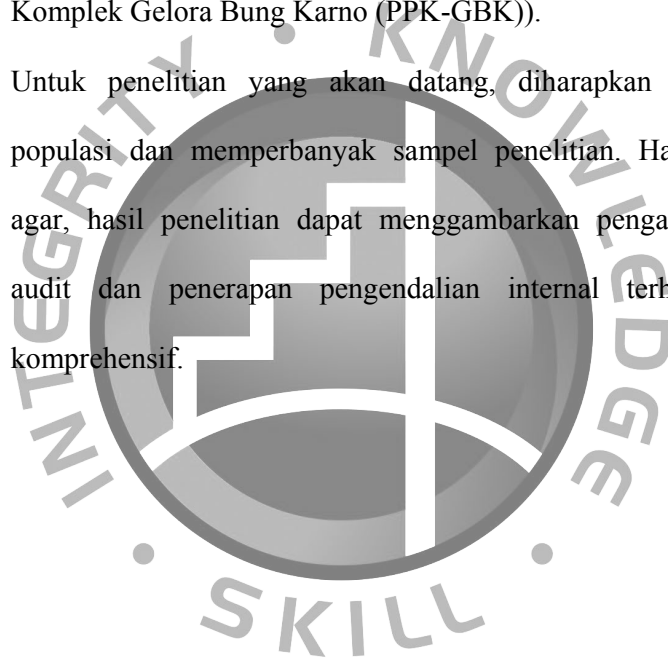
- b. SPI sebaiknya dapat menyerap calon tenaga auditor internal yang kompeten dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada auditor tetap, demi meningkatkan kualitas internal audit.
- c. SPI sebaiknya lebih memfokuskan kepada area risiko yang menghambat pencapaian sasaran strategis, karena hal tersebut adalah salah satu dari ruang lingkup dan peran internal audit secara teori, hal tersebut dapat dilakukan dengan menelaah kembali sasaran strategis dalam melakukan internal audit pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor.
- d. SPI sebaiknya mendapatkan akses tidak terbatas (4-12 kali setahun) terhadap para anggota pimpinan dan berkomunikasi informal dengan pimpinan, serta menjadi bagian dalam rapat-rapat pimpinan, sehingga fungsi internal audit pada Universitas Terbuka Pusat dan UPBJJ-Bogor dapat digunakan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- e. SPI sebaiknya dapat terlibat lebih jauh dalam revisi penyelenggaraan RKAP, dengan ditunjuknya SPI sebagai fasilitator RKAP, sebaiknya SPI meningkatkan keterlibatannya dengan cara memperluas perannya dengan menjadi konsultan yang baik pada BLU ini.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya :

- a. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan faktor lain yang dapat mempengaruhi terwujudnya GCG. Faktor-faktor lain ini

seperti yang ada pada penelitian terdahulu, antara lain komite audit, direksi, dan pangaruh audit manajemen.

- b. BLU yang ada di dalam penelitian ini hanyalah Universitas Terbuka, untuk penelitian selanjutnya, objek ini dapat diperluas, dengan meneliti BLU lain, seperti BLU penyedia barang dan jasa (contoh : rumah sakit), BLU penyedia dana (contoh : Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol), BLU pengelola kawasan (contoh : Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK)).
- c. Untuk penelitian yang akan datang, diharapkan dapat memperluas populasi dan memperbanyak sampel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar, hasil penelitian dapat menggambarkan pengaruh antara internal audit dan penerapan pengendalian internal terhadap GCG lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2008). *Auditing : (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I. Edisi ketiga*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Amin Widjaja Tunggal. 2000. *Auditing Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rineka.
- Arens, Elder, Beasley. 2009. *Auditing and Assurance Service. Pendekatan Terintegrasi Jilid I dan II. Edisi Keduabelas*. Jakarta : Erlangga.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Ciptaita
- Aryanti, Sita. 2012. **Peran Komite Audit dan Audit Internal Dalam Perwujudan Good Corporate Governance Pada BUMN yang Sudah Go Public (Studi Kasus : PT Wijaya Karya Tbk.)**. Jakarta. Skripsi program S1, Perpustakaan Universitas Indonesia.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam, Konteks Indonesia*. Jakarta : Dedy Jacobus.
- Efendi, Arief. 2006. **Perkembangan Profesi Internal Audit Abad 21**. Kuliah Umum Universitas Internasional Batam. [Http://muhariefefendi.files.wordpress.com/2007/12/makalah-perkembangan-profesi-internal-audit-abad-21.pdf](http://muhariefefendi.files.wordpress.com/2007/12/makalah-perkembangan-profesi-internal-audit-abad-21.pdf).
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hartanto, D. 1994. *Akuntansi untuk Usahawan*. Jakarta : salemba.
- H.A. Rodi Kartamulja . 2005. **Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Intern, dan Audit Intern Terhadap GCG**. Bandung. Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran.
- Hery. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung : Alfabeta.
- Hiro Tugiman. 2011. *Pengendalian dan Audit Internal Organisasi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kurnia, Lahu. 2011. **Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk**. Jakarta. Program S1, STIE Perbanas.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004, *Standar Profesi Audit Internal*. 2004. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Lawrence Sawyer B dkk, 2005. *Sawyer's Internal Auditing, Buku I, Edisi 5*, Penerjemah Desi Adhariani. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Maylina Pramono, Raharja. Diakses penulis oktober 2012. **Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance**. [Http://sna.akuntansi.unical.ac.id/makalah/110-SIPE-63.pdf](http://sna.akuntansi.unical.ac.id/makalah/110-SIPE-63.pdf).
- Marlene Davies. 2008. *Effective Working Relationships Between Audit Committees and Internal Audit-The Corner Stone Of Governance in Local Authorities, a Welsh Perspective*. Jurnal Social Science Research Network (SSRN). <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.macrothink.org%2Fjournal%2Findex.php%2Fjpag%2Farticle%2Fdownload%2F1271%2F1055&ei=Tg7UUbX3N8GmrQesr>

[ICQBA&usg=AFQjCNG4yxwYITVLOJYIZ7xyAEB-a9ojwQ&sig2=TXhRPVwTlxcMdiCpdQxLOA&bvm=bv.48705608.d.bmk](http://www.westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2013/02/ZG12-134-Isa-tak-Morariu-Ana-and-Ayhan-Guney-Full-Paper-Ready.pdf)

- Moeller, Robert.2009. *Brink's Modern Internal Auditing, edisi 7*. New Jersey: John Wiley & Sons
- Moh Nazir.2005. *Yayasan Pendidikan Internal Audit*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Morariu et al.2009.*The Importance of The Financial Audit Perception in The Internal Control Structure to Prevent The Financial Crises:Evidence From Romania*. Jurnal. <http://www.westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2013/02/ZG12-134-Isa-tak-Morariu-Ana-and-Ayhan-Guney-Full-Paper-Ready.pdf>
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muttaqin, Cut Imama.2004. **Pengaruh Faktor-Faktor Internal Audit Terhadap Pelaksanaan GCG**. Bandung. Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2002, **Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Badan Usaha Milik Negara**. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional.1990.**Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**. Jakarta
- Pratolo, Suryo. 2007. **“Good Corporate Governance Dan Kinerja Bumn Di Indonesia:**
Aspek Audit Manajemen Dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan”. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Sarbanes Oxley Act* Summary.2002. <http://www.soxlaw.com/s404.htm>
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie .2010. *Research Methods for Business a Skill Building Approach*. United Kingdom: John Willey and Sons Ltd..
- Sunyoto, Danang.2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis,CAPS*. Jogyakarta : CAPS Publishing.
- Suryabrata, Sumadi.2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Syofyan, Efrizal.2004.**Pengaruh Peran Komite Audit, Direksi, dan Internal Audit Terhadap Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG**. Bandung. Program PascaSarjana, Universitas Padjajaran.
- Tadikapury, Violetta Jingga.2011.**Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank X TBK Kanwil X**. Makasar. Program S1, Universitas Hasanuddin.
- Universitas Terbuka. 2013. [Www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id).
- Wenda, w.2008. **“Evaluasi Peranan Internal Control Dalam Membantu Auditor Menentukan Sifat, Saat, dan Lingkup Audit atas Prosedur Penggajian Pada PT Lahanwicaksana Prima”**. Jakarta, Program S1, Universitas Bina Nusantara.
- Windrya, Amartiwi.2012. **Analisis Peran dan Penerapan Pengendalian Internal, Audit Internal dan Komite Audit Dalam Upaya Peningkatan Good Corporate Governance (GCG)**. Jakarta. Program S1, Universitas Indonesia.



